



# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TA 2024

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

# KATA PENGANTAR

## Kepala Balai Besar POM di Bandung

**“Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI senantiasa selalu berkomitmen menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 dapat diselesaikan. Tahun 2024, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2024, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2024 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN)

Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 disusun pada akhir triwulan I pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban



kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan berikutnya.

Bandung, 29 April 2024

Kepala Balai Besar POM di Bandung,



**Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis .....

2.1 Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024

2.5 Metode Pengukuran

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung .....

3.1.2 Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....

3.1.3 Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.4 Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.5 Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung .....

3.1.6 Sasaran Kegiatan Ke-6: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan .....

3.1.7 Sasaran Kegiatan Ke-7: Meningkatnya Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Bandung yang optimal

## Bab 1 Pendahuluan

## Bab 2 Perencanaan Kinerja

## Bab 3 Akuntabilitas Kinerja





- 3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 3.1.9 Sasaran KegiatanKe-10: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang Berkinerja Optimal
- 3.1.10 Sasaran KegiatanKe-11: Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Bandung yang Terintegrasi dan Adaptif
- 3.1.11 Sasaran KegiatanKe-12: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel
- 3.2 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Kegiatan

## Bab 4 Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan I tahun 2024. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2024 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2024. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 111,11%, dan sebanyak 4 (empat) indikator kategori Cukup yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 98,53%, Persentase Obat yang memenuhi syarat 85,06%, Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 98,45%, dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 93,49%.

Sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung”** dengan capaian indikator kegiatan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT belum dapat disimpulkan terkait pengukuran indeks dilakukan pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** dengan 3 (tiga) indikator kegiatan, yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, ketiganya belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 107,03%, 4 (empat) indikator dengan kategori Cukup yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 99,30%, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,92%, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 85,43%, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 98,72%, 1 (satu) indikator



dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 183,35%. Dan 2 (dua) indikator diukur pada Triwulan berikutnya yaitu Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung dan Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan kelima yaitu **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan”** dengan semua indikator kegiatan 3 (tiga) Indikator dengan kategori Cukup, yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 99,54%, dan Jumlah desa pangan aman sebesar 96,67%, dan Jumlah Pasar Pangan aman Berbasis Komunitas sebesar 75,00%, dan 1 (satu) indikator dengan kategori Kurang yaitu Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sebesar 34,65%,

Sasaran kegiatan keenam yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** dengan semua indikator kegiatan 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik, yaitu, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 115,30%, dan 1 (satu) IKU dengan kategori Cukup yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 88,30%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 154,23%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal”** dengan 3 (tiga) indikator kegiatan, yaitu Indeks RB BBPOM di Bandung, Nilai AKIP BBPOM di Bandung, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesembilan yaitu **“Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal”** dengan indikator kegiatan Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesepuluh yaitu **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** diperoleh capaian 2 (dua) indikator kinerja dengan 1 (satu) kategori Cukup yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal sebesar 96,67% sedangkan IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesebelas yaitu **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel”** diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Nilai



Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung sebesar 107,38, dan 3 (tiga) indicator yaitu Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri belum dapat diukur karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp 60.149.475.000,- Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 dengan presentase 33.61% yaitu sebesar Rp. 20.214.980.571,-. Dari sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Indeks Pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Sasaran Kegiatan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan dengan cukup efisien. Meskipun demikian pada triwulan berikutnya di tahun 2024 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2020-2024.







# BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung bulan Januari s.d. Maret atau Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan I Tahun 2024 dan tahun kelima dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain : 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industry Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; dan 5) aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informai untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden



## **LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024**

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 21 (dua puluh satu); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 34 (tiga puluh empat).

### **KEDUDUKAN**

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

### **TUGAS**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**TABEL 1.1  
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
<b>BBPOM di Bandung</b>	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Bandung</li> <li>2. Kabupaten Subang</li> <li>3. Kabupaten Cianjur</li> <li>4. Kabupaten Garut</li> <li>5. Kabupaten Bandung Barat</li> <li>6. Kabupaten Majalengka</li> <li>7. Kabupaten Sumedang</li> <li>8. Kabupaten Bandung</li> <li>9. Kabupaten Karawang</li> <li>10. Kota Bekasi</li> <li>11. Kabupaten Bekasi</li> <li>12. Kabupaten Sukabumi</li> <li>13. Kota Cimahi</li> </ol>

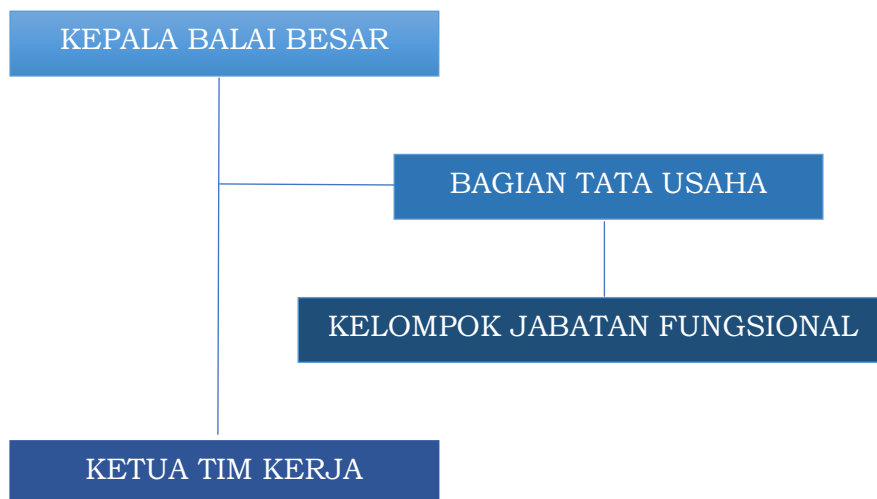




UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.



### 1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2024 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

#### ISU INTERNAL

##### **Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.





## **LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024**

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Sumberdaya Manusia**

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

### **Sarana Prasarana**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m<sup>2</sup>. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

### **Peralatan Laboratorium**

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan



peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2023, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

### **Regionalisasi Laboratorium**

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

### **ISU EKSTERNAL**

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

#### **Sistem Kesehatan Nasional (SKN)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan,



## LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

### **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan



terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

### **Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional**

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023 terdapat 85 industri farmasi, 43 industri Obat Tradisional, 103 industri kosmetik, 44 industri suplemen makanan, 60 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 609 Industri Pangan dan 23.774 Industri Rumah Tangga Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %.



Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan SNI ISO 37001:2016

### **Perubahan Iklim**

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat





baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

### **Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro- ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

### **Tuntutan masyarakat**

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

### **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**



Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

### **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan



yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

### **Implementasi Program Fortifikasi Pangan**

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap



produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

### **Jejaring Kerja**

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S), dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

### **Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

### **Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemik**



## LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat. Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Selama masa pandemik tersebut menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.

Namun pada awal tahun 2022, banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, sehingga Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemik. Di sisi lain pada tanggal 30 Desember 2022 kebijakan PPKM di Indonesia Resmi Dicabut oleh presiden yang mengarah kepada

transisi pandemik menuju ke arah endemik dengan sejumlah indikator, antara lain laju penularan harus kurang dari 1, angka positivity rate harus kurang dari 5%, kemudian tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka fatality rate harus kurang dari 3%, dan level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kondisi – kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Proses transisi itu sejalan dengan kebijakan pelonggaran-pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Pelonggaran tersebut dilakukan antara lain dengan menurunkan level PPKM menjadi level 2, menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin hingga dosis ke-2. Dengan adanya transisi endemik, tugas pengawasan Obat dan Makanan akan lebih optimal, namun inovasi yang telah dibuat harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, banyak respon positif dari lintas sektor dan masyarakat terhadap inovasi khususnya layanan publik berbasis digital yang telah dilakukan di masa pandemik Covid 19. Hal ini, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BBPOM di Bandung untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.







## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2020-2024**



### **2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**TAHUN 2024**

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024**

### **2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)**

**TAHUN 2024**

### **2.5 METODE PENGUKURAN**

**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung**

## **2.1 REVITU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

Rencana strategis BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

#### **VISI**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.



## LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu: -

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

### MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan i

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

*Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

*Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

*Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

*Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024





# LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

## SASARAN KEGIATAN

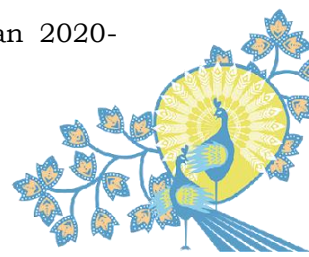
Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil rewiu dirubah menjadu sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-



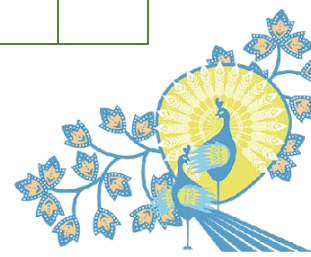
**LAPORAN KINERJA INTERIM**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reuiu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung  
 Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang Memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00



**LAPORAN KINERJA INTERIM**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

Layanan Publik BBPOM di Bandung									
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100



**LAPORAN KINERJA INTERIM**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2024 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.07.23.414 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
 Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung  
 Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	98,5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	88,8
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	82,9
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	76	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80	86,7
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6	97,5
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01	85,01
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	92	92,75
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	99
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	90





**LAPORAN KINERJA INTERIM**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	99,78
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	81
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,55	4,45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	81	100
		17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	95
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,6	96,6
		19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150	138
		20. Jumlah desa pangan aman	47	45
		21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23	21
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100
		23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	24. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	25. Indeks RB BBPOM di Bandung	85,8	92,47
		26. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	90,5	84
		27. Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,64
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	82	91,32
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	94	88,04



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Informasi pengawasan Obat dan Makanan	30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	3
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,9	91,01
		32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	75,28
		33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	84
		34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	60

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan RKT Tahun 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 65.003.803.000,-.

Pada tanggal 24 November 2023 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 65.003.803.000,-.

Tabel 2.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung  
Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,8
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,9
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,7
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,5



**LAPORAN KINERJA INTERIM**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	92,75
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100
		17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6
		19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138
		20. Jumlah desa pangan aman	45
		21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	24. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	25. Indeks RB BBPOM di Bandung	92,47
		26. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	84
		27. Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,64



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	91,32
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,04
		30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	91,01
		32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,28
		33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84
		34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

**Anggaran (Menjadi)**

Rp.32.440.638.000,-

Rp.32.563.165.000,-



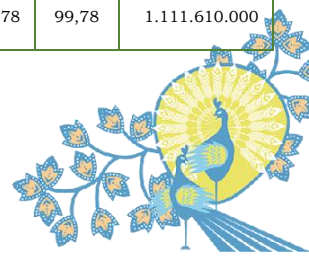
## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)  
Tahun 2024

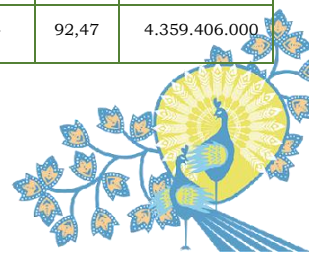
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	1.410.937.360
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	513.163.150
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	724.878.640
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	265.541.850
	5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75.515.000
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	86,7	114.100.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	97,5	142.776.000
	8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	85,01	254.410.000
	9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	92,75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	92,75	989.130.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	154.514.000
	11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	4.820.000
	12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	1.111.610.000





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
	yang diselesaikan tepat waktu														
	13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	878.610.000
	14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.176.015.000
	15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	430.080.000
	16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	10,00	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100	159.963.000
	17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	307.340.000
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	11.939.733.000
	19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	138	853.269.000
	20. Jumlah desa pangan aman	45	0,00	10,00	15,00	20,00	40,00	45,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00	45	1.223.482.000
	21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21	0,00	10,00	20,00	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	21	247.573.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	374.839.000
	23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	374.839.000
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	24. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	5,00	15,00	22,00	38,00	32,00	38,00	44,00	49,00	56,00	62,00	66,00	80,00	1.498.983.000
Terwujudnya tatakelola	25. Indeks RB BBPOM di Bandung	92,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,47	4.359.406.000



# LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	26. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	216.204.000
	27. Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,64	95.360.000
Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	91,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,32	26.380.562.000
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,04	1.822.498.900
	30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	693.755.600
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	91,01	25	35	45	55	60	65	70	75	80	85	87	91,01	210.436.000
	32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,28	455.803.000
	33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	548.317.000
	34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	141.010.500

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$








Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 + (1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

				
<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Cukup</b>	<b>Kurang</b>
$X > 120\%$	$100\% \leq x \leq 120\%$	$=100\%$	$70\% \leq x < 100\%$	$X < 70\%$

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Keterangan :

NP : Nilai Perspektif  
 NSS : Nilai Sasaran Strategis  
 SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Keterangan:






NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif




Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:.

**TABEL 2.6**  
**KRITERIA PENCAPAIAN NPSS**

				
<b>Istimewa</b>	<b>Baik</b>	<b>Butuh Perbaikan</b>	<b>Kurang</b>	<b>Sangat Kurang</b>
>100%	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	< 50

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

**TABEL 2.7**  
**KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN**

<b>Kategori</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Notifikasi Warna</b>
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$ .	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ( $70 \leq x < 100$ ).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ( $x < 70$ ).	

## **B. REALISASI ANGGARAN**

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.



## LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Output}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.8

### KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)







# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

## **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

## **3.2 REALISASI ANGGARAN**










Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2024 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Triwulan 1 tahun 2024 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	97,33	CUKUP	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,73	SANGAT BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	76,47	CUKUP	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,80	SANGAT BAIK	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120,00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	96,67	CUKUP	
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	107,38	SANGAT BAIK	



Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 34 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98.50	98.50	97.05	98.53	CUKUP
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.88	88.88	75.53	85.06	CUKUP
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	95	98.45	CUKUP
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.9	82.9	77.5	93.49	CUKUP
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	100	111.11	SANGAT BAIK
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>97.33%</b>	<b>CUKUP</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86.7	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>-</b>	<b>DIUKUR PADA AKHIR TAHUN</b>



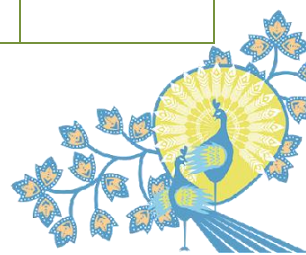
**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.5	97.5	97.93	100.44%	SANGAT BAIK
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85.01	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	92.75	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				-	<b>DIUKUR PADA AKHIR TAHUN</b>
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99	99	98,31	99,30%	CUKUP
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	90	96,33	107,03%	SANGAT BAIK
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78	99,78	99,7	99,92%	CUKUP
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	59,8	85,43%	CUKUP
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81	81	79,96	98,72%	CUKUP



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,45			0,00%	DIUKUR MULAI TRIWULAN III
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	20	36,67	183,35%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	0	0	0,00%	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>101,73%</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,6	96,16	99,54%	CUKUP
		19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	20	6,93	34,65%	KURANG
		20. Jumlah desa pangan aman	45	15	14,5	96,67%	CUKUP
		21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21	20	15	75,00%	CUKUP
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>76.47%</b>	<b>CUKUP</b>
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	17,66	88,30%	CUKUP





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	23,06	115,30%	SANGAT BAIK
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>101.80 %</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	22	33,93	154,23%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>120%</b>	<b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	25. Indeks RB di BBPOM Bandung	92.47	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		26. Nilai AKIP di BBPOM Bandung	84	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		27. Nilai Pengelolaan Kerarsipan	96.64	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>-</b>	<b>DIUKUR PADA AKHIR TAHUN</b>
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	91.32	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>-</b>	<b>DIUKUR PADA AKHIR TAHUN</b>
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.04	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		30. Indeks pengelolaan data dan informasi di BBPOM Bandung yang optimal	3	3	2.90	96.67%	CUKUP



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>96.67%</b>	<b>CUKUP</b>
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6	45	48,32	107,38%	SANGAT BAIK
		32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,28	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>				<b>107,38%</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Pada triwulan I tahun 2024, terdapat enam (6) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I Tahun 2024 berdasarkan Perspective Balance Score Card memiliki Nilai Kinerja 98 dengan kategori **BAIK** dengan rincian Stakeholder Perspective (97,33); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (100) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (96,67), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:



**TABEL 3.3  
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN  
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

<b>PERSPECTIVE</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>	<b>NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE</b>
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	97,33	<b>97,33</b>
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,73	<b>100,00</b>
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	76,47	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,80	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120,00	
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	<b>96,67</b>
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	96,67	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	107,38	
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>			<b>98</b>

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini :









**SASARAN  
KEGIATAN  
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **97,33%** dengan kriteria **CUKUP**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.50%	97,05%	98,53%	CUKUP	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.80%	75,53%	85,06%	CUKUP	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96.50%	95,00%	98,45%	CUKUP	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82.90%	77,50%	93,49%	CUKUP	
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00%	100,00%	111,11%	SANGAT BAIK	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>97,33%</b>	<b>CUKUP</b>	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

**1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT**

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2024 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024. Sampel Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat




tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2024.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

TABEL 3.5  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

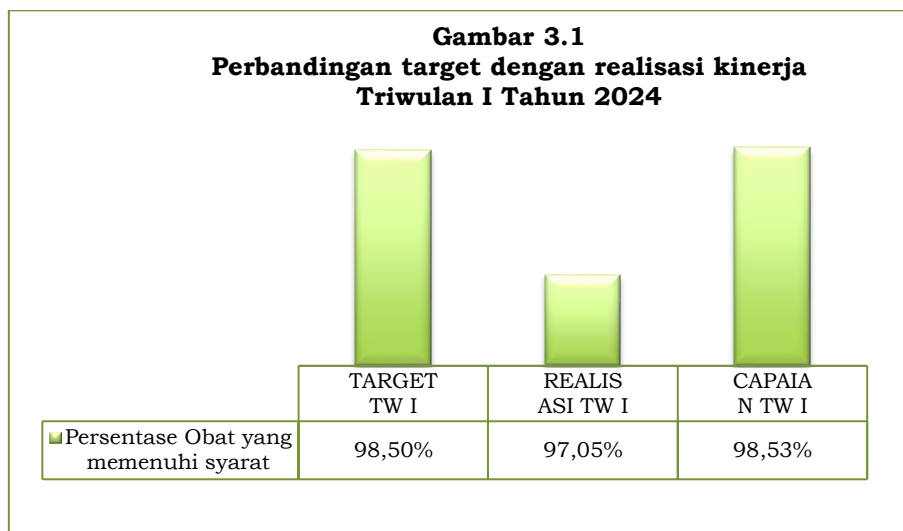
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.50%	97,05%	98,53%	CUKUP	

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 98,50%. Sebanyak 237 sampel Obat acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 230 sampel memenuhi syarat, 7 sampel tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 97,05%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **98,53%** dengan kriteria **CUKUP**.







#### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98,52%.

TABEL 3.6

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.50%	97,05%	98,52%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98,52% dengan kategori AKAN TERCAPAI.

#### **C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain :

- Pada Triwulan I hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 7 sampel yaitu 2 sampel obat (TMS mutu pengujian dengan parameter uji disolusi dan penetapan kadar zat aktif), sampel obat tradisional sebanyak 4 sampel



(ALT, AKK, Angka Enterobacteriaceae) dan 1 sampel kosmetik (TMS mutu pengujian mikrobiologi/ALT).

- ⚙️ Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan rendah di Triwulan I, hal ini dapat dilihat dari hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan yaitu sebesar 72,92% (35 dari 48 sarana yang diperiksa).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ⚙️ Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ⚙️ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- ⚙️ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ⚙️ Meningkatkan operasi Penindakan atau operasi penertiban terhadap peredaran produk Obat yang beredar dan tidak memenuhi syarat sesuai tingkat resiko dan prioritasnya.

#### D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja:

- Sampel obat yang disampling sampai dengan triwulan I baru sebesar 20.84% dari target 25%. Sampling obat baru dilakukan akhir bulan Januari 2024 dan rencana pelaksanaan sampling sampel diturunkan dibulan Maret karena penyesuaian jam kerja di Bulan Ramadhan, Sehingga mempengaruhi jumlah sampel yang selesai uji yaitu hanya sebesar 14.48% dari target 15% selesai uji pada triwulan I.
- Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 jumlah sarana produksi Obat yang diperiksa sejumlah 48 sarana.



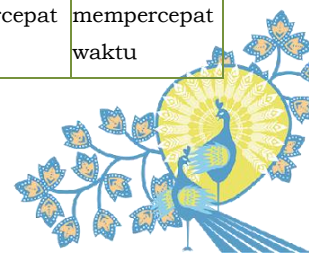
- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Triwulan I TA 2024 sebesar 87,94% dari target 79,33%.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7  
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi  
“PRESENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB.	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	-	-	Tingginya tingkat peredaran produk Obat yang Tidak memenuhi syarat	Peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat menurun
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen	-	-	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					penyelesaian dokumen	penyelesaian dokumen
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	Telah dilakukan KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka.	-	-	Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakn setiap bulan.	Melakukan peningkatan pengetahuan Pelaku Usaha melalui KIE dan pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	-	-	Pelaku usaha terutama di sarana distribusi yang tidak mengetahui ketentuan dan produk yang TMS, akan selalu menyediakan produk TMS tersebut	
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan	-	-	Sinergitas dalam melakukan pengawasan	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	distribusi Obat.	melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.			an Produk Obat yang TMS masih rendah, karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	Obat yang TMS akan baik dan Tingkat efektifitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan mengurangi peredaran produk Obat TMS
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.	Telah dilaksanakan tindak lanjut terhadap sarana yang mengedarkan produk Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai pedoman Tindak Lanjut	-	-	Telah dilaksanakan tindak lanjut terhadap sarana yang mengedarkan produk Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai pedoman Tindak Lanjut Peningkatan operasi penindakan kepada Pelaku Usaha illegal akan meningkatkan peredaran produk Obat MS dipasaran	Dengan adanya operasi penindakan terhadap pelaku usaha illegal, akan menurunkan peredaran produk Obat TMS yang diproduksi olehnya

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian





kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat...  
Narasi Inspeksi
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia menggunakan aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Penggunaan aplikasi tersebut mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - o Di laboratorium mikrobiologi menggunakan aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga menggunakan aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

## **2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT**

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2024 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, dengan




kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

Sampel makanan acak yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 88 sampel. Dengan hasil uji sebanyak 71 sampel MS dan 23 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8.

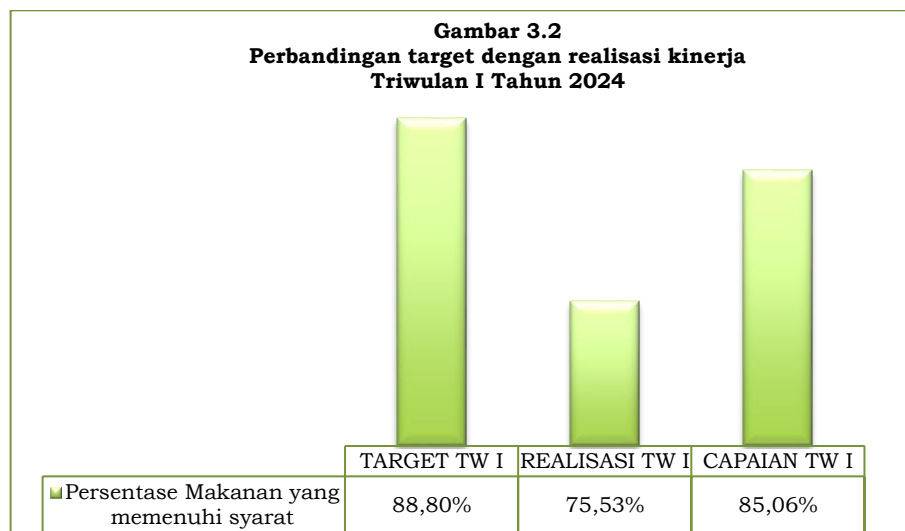
TABEL 3.8  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.80%	75,53%	85,06%	CUKUP	

#### A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 88,80%. Realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar 75,53%, dengan rincian 71 sampel memenuhi syarat dan 23 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 188 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **85,06 %** dengan kriteria **CUKUP**.





#### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2024**

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88,80%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 85,06%, dengan kategori TERCAPAI.

TABEL 3.9  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.80%	75,53%	85,06%	AKAN TERCAPAI	

#### **C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Kegagalan capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I tahun 2024 ini disebabkan oleh:

- Masih ditemukan produk dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 23 sampel ( TMS BTP Pengawet sebanyak 22 sampel dan 1 Sampel TMS Pemanis ) dari total sampel sebanyak 94 sampel uji.
- Terdapat sedikit penurunan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi ketentuan yang diperiksa sampai dengan triwulan I. Pada Triwulan I dari 54 sarana yang diperiksa, sebanyak 26 sarana memenuhi ketentuan (48,15). (Data dari Inspeksi)



Alternatif solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi pangan dalam pemenuhan CPPOB, CPPIRT, CRPB.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Pangan, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelaku usaha di bidang Makanan, tentang Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana distribusi pangan dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- Meningkatkan operasi Penindakan atau operasi penertiban terhadap peredaran produk Pangan yang beredar dan tidak memenuhi syarat sesuai tingkat resiko dan prioritasnya.

**D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

- Pengambilan contoh sampel Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan
- Pengawasan dan pembinaan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 54 sarana, semakin banyak sarana yang dibina akan meningkatkan peredaran produk Makanan yang memenuhi syarat.
- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Triwulan I TA 2024 sebesar 87,94% dari target 79,33%.



**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

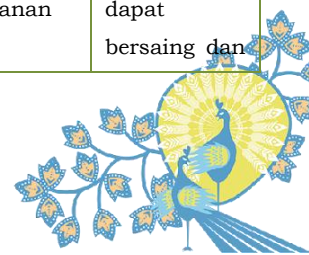
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, *Public Warning* Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yang masih belum memenuhi ketentuan.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang belum memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 55 sarana distribusi pada triwulan I tahun 2024.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

TABEL 3.10

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI  
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
a Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio				Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Makanan yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Makanan TMS	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Makanan yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan





Rekomendasi	Tindaklanjut				Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum				
		Rencana Aksi	Timeline			
					tersebut masih ada di peredaran	hilang dari peredaran
b Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yang masih belum memenuhi ketentuan					Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Syarat yang dihasilkan menjadi Tinggi	Pelaku usaha sudah menerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang belum memenuhi ketentuan	Telah dilakukan pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat.				Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Makanan yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Makanan TMS tersebut masih ada di peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Makanan yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
e Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan	Telah dilakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi				Sinergitas dalam melakukan pengawasan	Sinergitas dalam melakukan pengawasan



Rekomendasi	Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.	yang disampaikan kepada instansi terkait.			n Produk Makanan yang TMS masih rendah, karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	Produk Makanan yang TMS akan baik dan tingkat efektifitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan mengurangi peredaran produk Makanan TMS

#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - o Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel



pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### **3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN**


Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2024 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2024.

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2024. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.

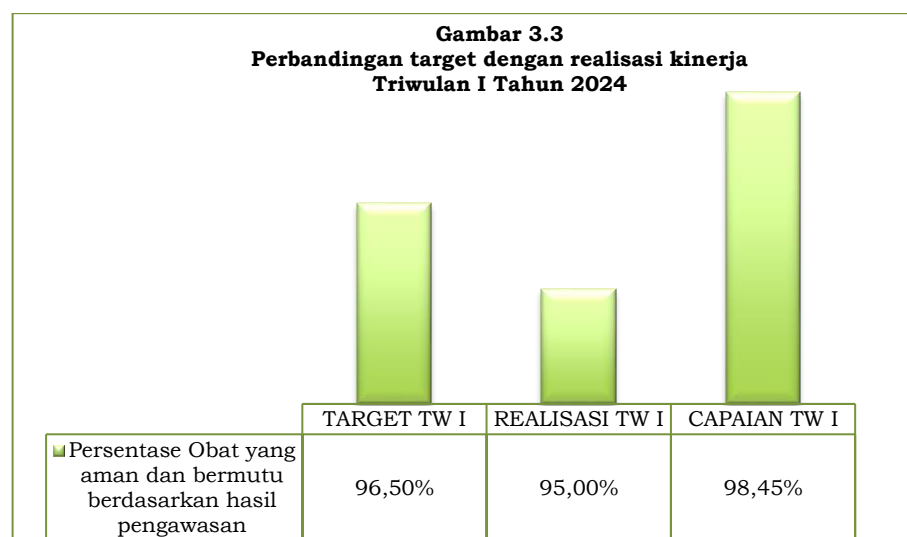


TABEL 3.11  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU  
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%	95,00%	98,45%	CUKUP	

#### A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 96.50%. Sampel Obat targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 100 sampel dengan rincian sebanyak 95 sampel memenuhi syarat dan 5 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 95,00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **98.45%** dengan kriteria **CUKUP**.




#### B. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahunan 2024

Pada triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96,50% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 Triwulan I sebesar 95,00% dengan capaian sebesar 98,45% (CUKUP). Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.12.



TABEL 3.12  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU  
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50%	95,00%	98,45%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98,45% dengan kategori AKAN TERCAPAI.

### C. Analisis Penyebab Kegagalan atas Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Sampai Triwulan I dari 100 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 5 sampel TMS, terdiri dari sampel obat tradisional sebanyak 1 sampel (TMS Pengujian mikrobiologi yaitu ALT dan AKK), suplemen Kesehatan sebanyak 1 sampel (TMS mutu pengujian kadar air) dan sampel kosmetika sebanyak 3 sampel (TMS mutu pengujian mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total).
- Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan menurun di Triwulan III ini, hal ini dapat dilihat dari hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan menurun dibandingkan dengan Triwulan III, yaitu sebesar 92,86% (13 dari 14 sarana yang diperiksa), sedangkan sampai Triwulan III sebesar 80,30% (106 dari 132 sarana yang diperiksa).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.





- Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

- Sampel obat yang disampling sampai dengan triwulan I baru sebesar 20.84% dari target 25%. Sampling obat baru dilakukan akhir bulan Januari 2024 dan mengakibatkan sampel baru selesai uji pada bulan Februari 2024. Sehingga mempengaruhi jumlah sampel yang selesai uji yaitu hanya sebesar 14.48% dari target 15% selesai uji pada triwulan I.
- Pengawasan dan pembinaan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan III tahun 2023 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 132 sarana.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan III tahun 2023 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 957 sarana.

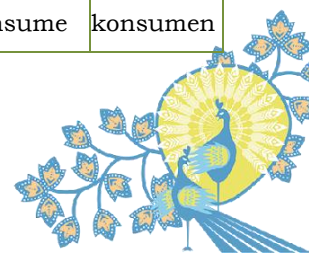
#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:



TABEL 3.13  
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI  
 “PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN  
 HASIL PENGAWASAN”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

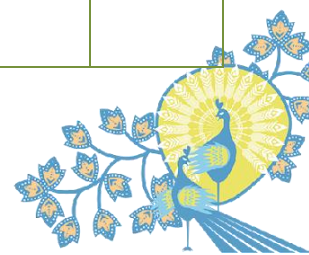
Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB.	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	-	-	Tingginya tingkat peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat	Peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat menurun
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen			Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik, sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Syarat yang dihasilkan menjadi Tinggi	Pelaku usaha sudah menerapkan Cara Produksi yang Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan	Melakukan peningkatan pengetahuan			Masyarakat sebagai konsume	Masyarakat sebagai konsumen



Rekomendasi		Tindaklanjut		Kondisi	Kondisi	
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
	Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka			n yang belum tereduksi i akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi i Syarat sehingga peredaran n Obat TMS tersebut masih ada di peredaran n	yang telah tereduksi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakn setiap bulan.	Melakukan peningkatan pengetahuan Pelaku Usaha melalui KIE dan pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka			Pelaku usaha terutama di sarana distribusi yang tidak mengetahui ketentuan dan produk yang TMS, akan selalu menyediakan produk TMS tersebut	
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait	Melakukan monev tindak lanjut hasil			Sinergitas dalam melakukan	Sinergitas dalam melakukan



Rekomendasi	Tindaklanjuti			Kondisi	Kondisi
	Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
		Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang disampaikan kepada instansi terkait			pengawasan Produk Obat yang TMS masih rendah, karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	pengawasan Produk Obat yang TMS akan baik dan tingkat efektivitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan mengurangi peredaran produk Obat TMS
f Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.				Tidak ada penindakan kepada Pelaku Usaha illegal akan meningkatkan peredaran produk Obat TMS dipasaran	Dengan adanya operasi penindakan terhadap pelaku usaha illegal, akan menurunkan peredaran produk Obat TMS yang diproduksi nya



#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat.. Narasi Inspeksi
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - o Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### **3. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted





memenuhi syarat pada tahun 2024 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024.


Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampel targeted yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 51 sampel, yang meliputi sampel PJAS 32 sampel, sampel kasus 17 sampel dan sampel Pemahit sebanyak 2 sampel.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

TABEL 3.14

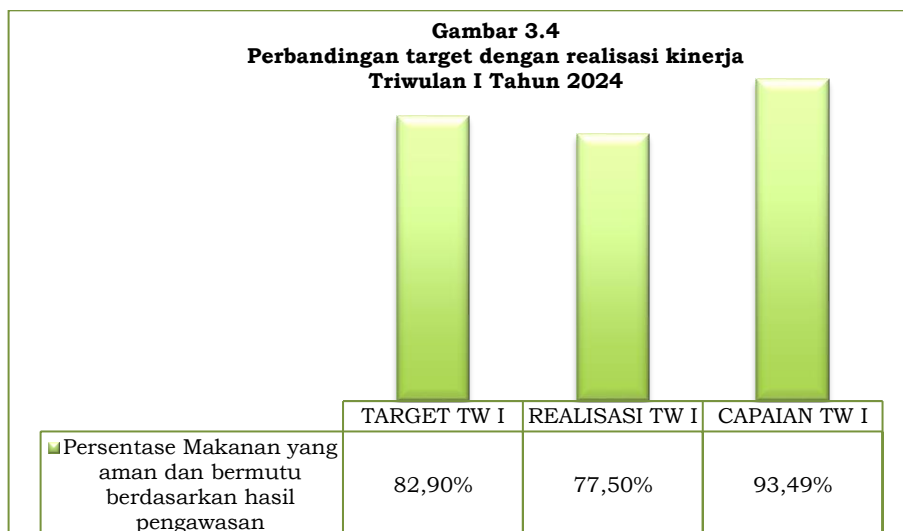
**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR**  
**“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU**  
**BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82,90%	77,50%	93,49 %	CUKUP	

**A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 82,90%. Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 77,50%, dengan rincian sebanyak 31 sampel Makanan targeted memenuhi syarat dan 9 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 51 sampel Makanan targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **93,49 %** dengan kriteria **CUKUP**.





**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.15

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU  
 BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,90%	77,50%	93,49%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82,90%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 93,49% dengan kategori AKAN TERCAPAI.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 9 sampel dari 40 sampel total yang diuji. Hasil Uji Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 9 sampel, dengan 7 Sampel diantaranya TMS Kimia, seperti pemanis dan pewarna, serta 2 sampel lainnya TMS Mikrobiologi.



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

**D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Telah dilaksanakannya Sebagian tahapan kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di dua Kabupaten /Kota

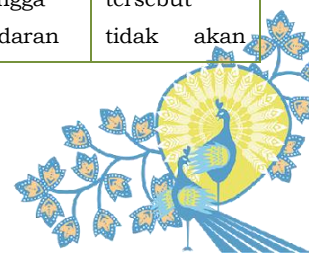
**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

TABEL 3.16

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI  
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN  
HASIL PENGAWASAN SD TRIWULAN III TAHUN 2023”

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
a Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.	KIE rutin yang telah dilaksanakan melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.	-	-	Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk makanan yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Makanan TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					Makanan TMS tersebut masih ada di peredaran	dapat bersaing dan hilang dari peredaran
b	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi	-	-	Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Syarat yang dihasilkan menjadi Tinggi	Pelaku usaha sudah emnerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala	-	-	Pelaku usaha belum melakukan perbaikan sehingga belum menerapkan ketentuan, akibatnya produk yang dihasilkan akan berisiko TMS	Pelaku usaha sudah melakukan perbaikan sehingga penerapan ketentaun dan persyaratann ya lebih baik, akibatnya dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan
d	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan	Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	-	-		



Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.					
e	Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan	-	-	Pelaku usaha belum melakukan perbaikan sehingga belum menerapkann ketentuan, akibatnya produk yang dihasilkan akan berisiko TMS	Pelaku usaha sudah melakukan perbaikan sehingga penerapan ketentaun dan persyaratannya lebih baik, akibatnya dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - o Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi





untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

#### **4. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT**

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2024 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024.


Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Sampel pangan Fortifikasi yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 60 sampel yang terdiri dari sampel garam beryodium sebanyak 60 sampel. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17.

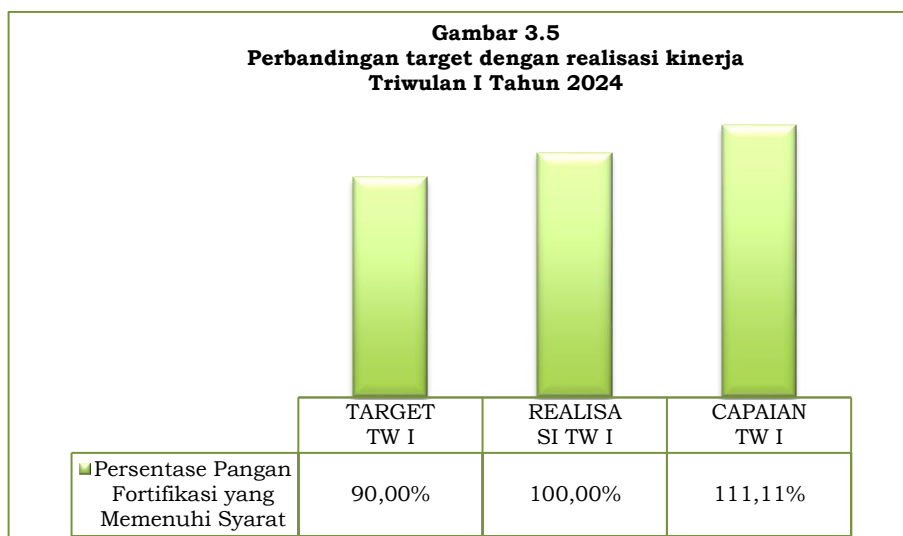


TABEL 3.17  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%	100,00%	111,11%	SANGAT BAIK	


**A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 90,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100,00 %, dengan rincian sebanyak 60 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 60 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **111.11%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**.



**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.18  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	100,00%	111,11%	TERCAPAI/ MELAMPA UAI	

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 111,11% dengan kategori TERCAPAI.

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan Atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar. Dimana pada triwulan I tahun 2024 hasil pengujian sampel makanan fortifikasi mencapai 100% (60 sampel). Dari hasil uji seluruh sampel, sebanyak 60 sampel MS.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

**D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Sampling sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB



tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Triwulan I TA 2024 sebesar 87,94% dari target 79,33%.

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Indikator ini baru ditambahkan di triwulan I sehingga belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan



baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

**G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





## SASARAN KEGIATAN KE-2      MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Sehingga pada Laporan Kinerja Interim triwulan I ini belum dapat menyajikan hasil pelaksanaan kinerja Sasaran Kegiatan ini.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.19  
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)  
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
$\leq 45,00$	TIDAK BAIK
45,01 – 60,00	KURANG BAIK
60,01 – 75,00	CUKUP BAIK
75,01 – 90,00	BAIK
$\geq 90,01$	SANGAT BAIK



## SASARAN MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT KE-3 DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Pengukuran indikator tersebut sebagian besar merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran kecuali Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara mandiri, akan tetapi perhitungan terhadap capaian kinerja tetap akan dihitung diakhir tahun 2024. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.

TABEL 3.20  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,50%	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	85,01%	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,75%	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:



## 1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 adalah 97,50 dan akan dihitung pada akhir tahun.

## 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.



Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 adalah 85,01 dan akan dihitung pada akhir tahun.

### **3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM**

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.21  
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik







Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 adalah 92,75 dan akan dihitung pada akhir tahun.

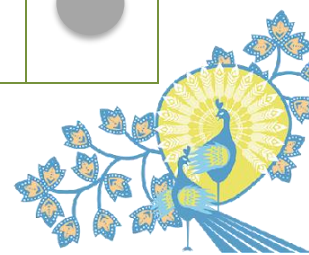


**SASARAN KEGIATAN KE-4**      **MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 8 (delapan) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan 2 (dua) indicator akan diukur pada akhir Tahun. Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101,73%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.22.

TABEL 3.22  
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99,00 %	90 %	99,30%	CUKUP	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00%	96,33%	107,03%	SANGAT BAIK	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78%	99,70%	99,92%	CUKUP	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00%	59,80%	85,43%	CUKUP	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00%	79,96%	98,72%	CUKUP	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	-	-	-	-	-
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar	20% (Progress)	36,67% (Progress)	183,35%	TIDAK DAPAT	





INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				DISIMPULKAN	
8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101,73%	SANGAT BAIK	


### 1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dari nilai rata-rata persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan I tahun 2024.

TABEL 3.23

#### CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

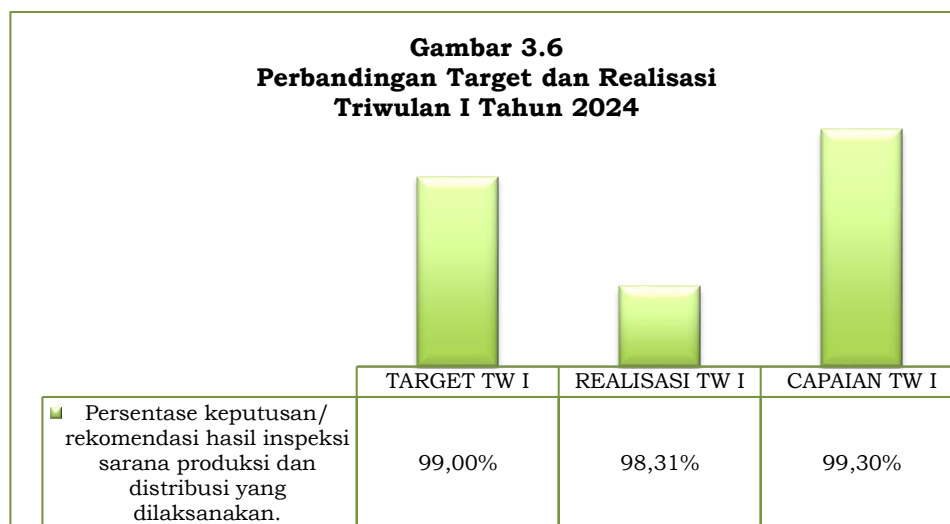
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG  
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99,00 %	98,31 %	99,30%	CUKUP	



**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan s.d triwulan I tahun 2024 sebesar **99,30%**, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100% **(A)**; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 92,86% **(B)**; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar 100% **(C)**; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100% **(D)**. Secara lengkap sampai dengan triwulan I keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dapat dilihat pada Gambar 3.6.



TABEL 3.24

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA  
 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024


Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Surat Tindak Lanjut	Jumlah yang telah Ditindaklanjuti	% Realisasi
<b>A</b>	251	251	100,00%
<b>B</b>	26	28	92,86%
<b>C</b>	27	27	100%
<b>D</b>	10	10	100,00%
Rata-Rata			98.31%



Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar **99%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **99,30%** dengan kriteria **CUKUP**.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.25  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA  
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99,00 %	98,31 %	99,30%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2024 indikator sasaran strategis ini ditetapkan sebesar 99%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tahun 2024, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 99,30% dengan kriteria AKAN TERCAPAI.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Ke Depan)**

Pada indikator sasaran kegiatan ini, dari 4 indikator yang ditetapkan terdapat satu indikator yang capaiannya kurang dari 100%, yaitu persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Realisasinya dari indikator ini hanya sebesar 92,86% dari target 99% yang ditetapkan, dengan demikian persentase capaiannya hanya sebesar 99,30%.

Hal ini disebabkan antara lain adanya kendala dalam hal persuratan melalui Srikandi yaitu proses migrasi dari versi 2 menjadi versi 3 yang mengakibatkan aplikasi tidak dapat diakses dengan baik.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

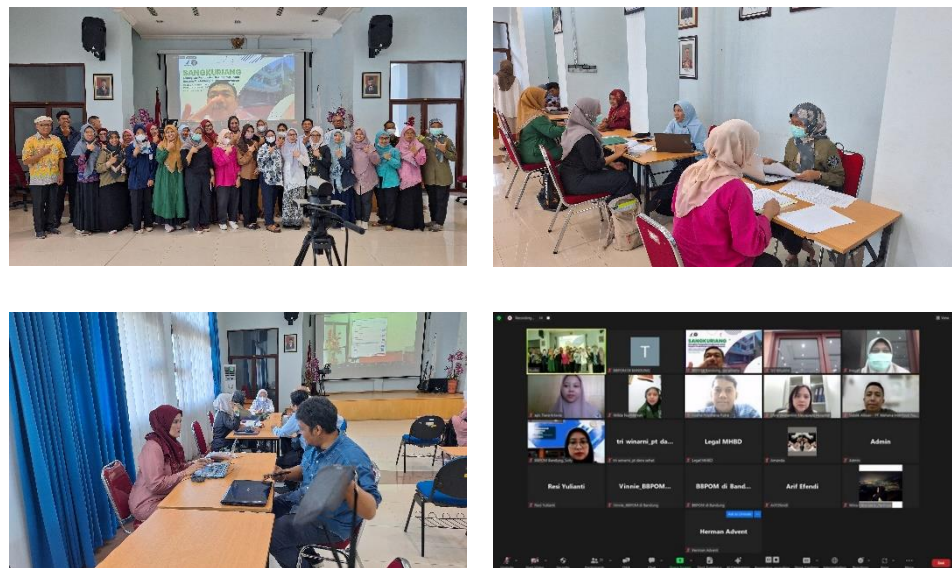


- Tersedianya fitur di SIPT yang mengakomodir feedback dari rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT dan Pusat sehingga tindak lanjut dapat berjalan efisien dan efektif.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi hasil pengawasan Pusat dan UPT lain serta surat tindak lanjut yang diterbitkan dilakukan oleh UPT secara terus menerus sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan menjamin pelaksanaan tindak lanjut yang tepat.
- Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan pada bulan Maret 2024 sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.



Gambar 3.7. Desk CAPA

- Pemberian sosialisasi kepada lintas sektor terkait pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten. Sosialisasi dan Bimbingan teknis yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :
  - a) Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
  - b) Narasumber kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kabupaten Bandung.



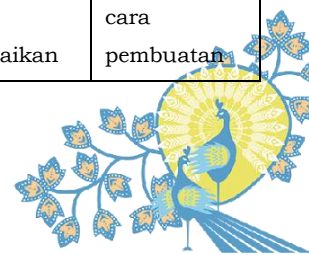
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dilaksanakan secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

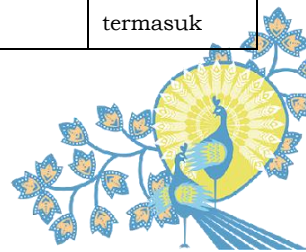
TABEL 3.26  
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI  
 “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA  
 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”  
 s/d TRIWULAN I TAHUN 2024

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) lebih ditingkatkan	Desk CAPA secara hybrid daring dan luring tanggal 25 Maret 2024	Kegiatan Sangkuring lanjutan	Triwulan II, III dan IV	Hasil inspeksi sarana produksi dan Distribusi belum di Tindak Lanjuti secara maksimal	Hasil inspeksi Sarana produksi dan Distribusi sudah di Tindak lanjuti secara maksimal
b	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi Obat dan Makanan telah dilaksanakan sd Triwulan I	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi Obat dan Makanan secara konsisten dilaksanakan	Triwulan II, III dan IV	Tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan Distribusi belum ada monitoring sehingga ada hasil inspeksi yang belum di Tindak lanjuti	Tindak lanjut hasil inspeksi saran sudah termonitor, sehingga semua inspeksi dapat di Tindak lanjuti
c	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembinaan kepada pelaku usaha setiap kali dilakukan pemeriksaan sarana</li></ul>	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana	Triwulan II, III dan IV	Pelaku usaha tidak dapat memberika n perbaikan	Pelaku usaha memahami dan mengetahui cara pembuatan





Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	<ul style="list-style-type: none"><li>Informasi email kantor dicantumkan dalam surat TL</li></ul>	distribusi baik secara daring ataupun luring terkait kewajiban untuk <i>compliance</i> terhadap peraturan dan bagaimana menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		/Tindak lanjut dari hasil inspeksi, karena tidak memahami ketentuan dan cara perbaikannya	CAPA, sehingga dapat melakukan Tindak Lanjut dari hasil inspeksi
d	Peningkatan Kompetensi Petugas	<ul style="list-style-type: none"><li>Bimtek CPOTB Junior yang diselenggarakan Bulan Maret 2024</li></ul>	Mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan bimtek yang diadakan oleh internal maupun eksternal	Triwulan II, III dan IV	Petugas belum memiliki kompetensi dan pemahaman yang berbeda sehingga Tindak lanjutnya bervariasi	Petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman tindak lanjut, sehingga hasil inspeksi dapat di tindak lanjuti
f	Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan	Integrasi aplikasi monitoring pengawasan hasil dan tindak lanjut CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Integrasi pengawasan sarana dengan aplikasi manajemen kinerja	Triwulan II Tahun 2024	Monev hasil pemeriksaa n secara manual sehingga masih terdapat hasil inspeksi yang belum ditermonitor dengan baik	Monev hasil pemeriksaan lebih terkendali sehingga hasil inspeksi dapat di TL dapat dimonitor lebih maksimal termasuk



Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
						pemenuhan timelinenya

#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan dengan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi SATU POM JABAR. Dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tinda lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

#### G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### 2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur dari rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan III tahun 2023.

TABEL 3.27

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

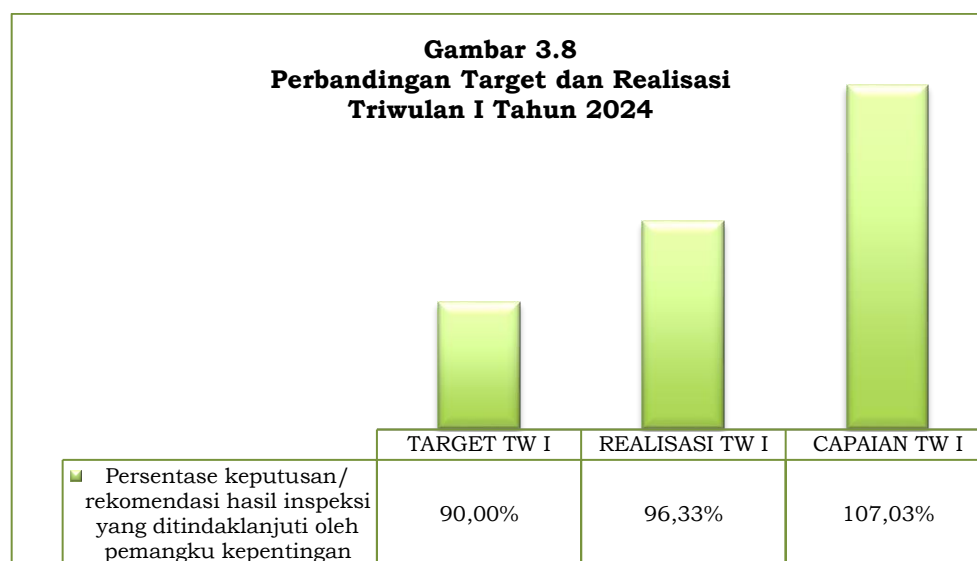


“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG  
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00%	96,33%	107,03%	SANGAT BAIK	

**A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan s.d triwulan I tahun 2024 sebesar **96.33%**, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 92.67% **(A)**; persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100% **(B)**. Secara lengkap perincian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dapat dilihat pada gambar 3.8.



TABEL 3.28

KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI  
OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN s.d TRIWULAN I TAHUN 2024

Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Surat Tindak Lanjut	Jumlah yang telah Ditindaklanjuti	% Realisasi
A	278	300	92.67%
B	4	4	100,00%
Rata-Rata			<b>96.63%</b>



Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar **90%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar **107.03%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**.


**B. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.29

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG  
 DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”

TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00%	96,33%	107,03%	TERCAPAI	

Target tahun 2024 indikator sasaran strategis ini ditetapkan sebesar 90%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tahun 2024, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **107,03%** dengan kriteria **TERCAPAI**.

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan Atas Peningkatan Kinerja Serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Ke Depan)**

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Adanya inovasi **SANGKURIANG**, yaitu : **Sinergitas Penguatan Kerjasama Untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**. Suatu inovasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan ketidaksesuaian hasil temuan pemeriksaan, baik sarana produksi ataupun distribusi
- Respon dari *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena pemahaman pelaku usaha dan *stakeholder* terkait kebutuhan pemenuhan CAPA sebagai salah satu *tools* yang mereka perlukan untuk pengawasan



mutu produk yang didistribusikan/diproduksi di sarana. Selain itu status CAPA-closed dari evaluator BBPOM merupakan salah satu syarat perpanjangan registrasi nomor izin MD/sertifikat CDOB dan pengajuan Ijin Penerapan CPPOB

- Adanya layanan jemput bola terhadap pemenuhan status CAPA-Closed oleh BBPOM Bandung dengan diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diselenggarakan pada bulan September 2023
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan semakin efektif. Peningkatan monitoring ini dilakukan melalui:
  - a) Rekonsiliasi data oleh petugas setiap akhir bulan.
  - b) Adanya kontribusi aktif dari petugas BBPOM Bandung dengan mengirimkan surat permohonan penyampaian CAPA kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA.
  - c) Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh bitly Monitoring Tindak Lanjut dan Rekomendasi selagi Aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) dalam tahap penyempurnaan
- Peningkatan respon dari lintas sektor terhadap keputusan hasil inspeksi menjadi lebih efektif. Hal ini dipengaruhi karena keputusan hasil inspeksi untuk ditindaklanjuti oleh lintas sektor disampaikan melalui surat elektronik (*email*) dan ditujukan langsung kepada personil penanggung jawab / pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat

Rekomendasi yang akan digunakan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

- Pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha melalui kegiatan Desk CAPA terus dilaksanakan secara periodik, dengan tema CAPA tematik.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung
- Monitoring dan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha terus menerus dilaksanakan, sehingga dapat mengawal CAPA tersebut sampai CLOSED

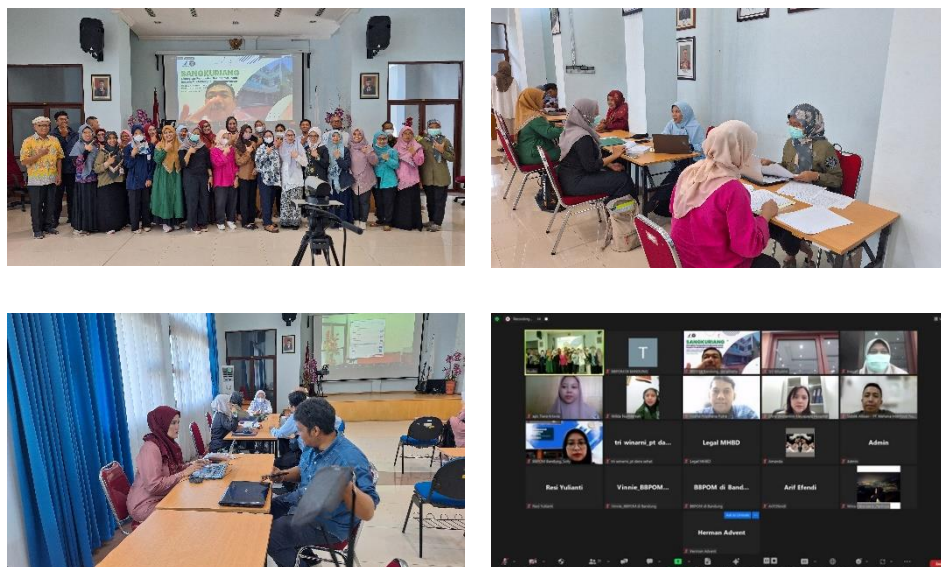




**D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

- Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan pada tanggal 30 Maret 2024 sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.



Gambar 3.9. Desk CAPA

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dilaksanakan secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindakan lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.30**  
**MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI**  
**“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG**  
**DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
a	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan	Triwulan II, III dan IV	Monitoring pelaksanaan CAPA tidak	Monitoring pelaksanaan CAPA sudah lebih efektif



bandung.pom.go.id  BPOiMBandung  @bpombandung  @BPOiMBandung  BataiBesarPOMiMBandung

#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


### **3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; (5). Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk



Rendah dan Sedang; (6). Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil; (7). Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru dan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; (8). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (9). Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; (11). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (12) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

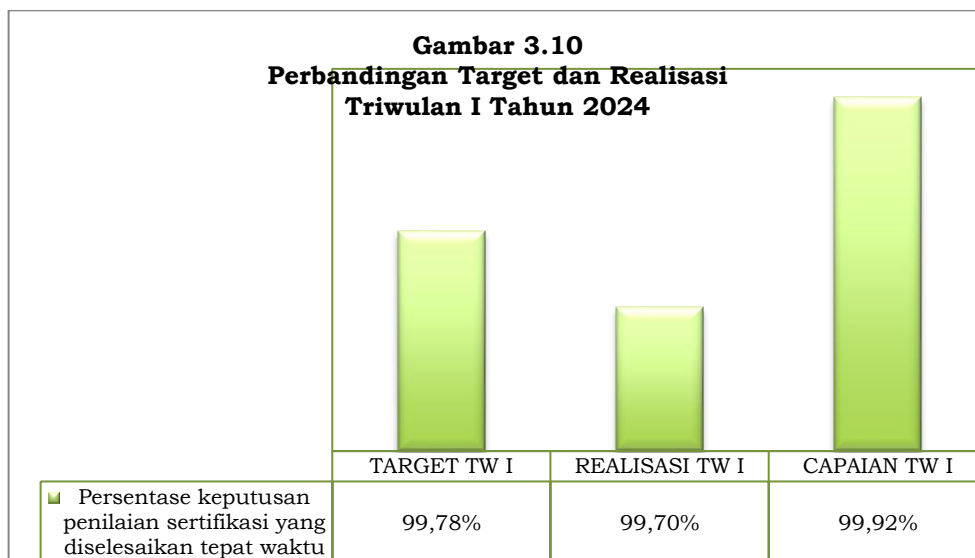
TABEL 3.31  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI  
 YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78%	99,7%	99,92%	CUKUP	

#### **A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada Triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 99,78%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW I tahun 2024 sebesar 99,7%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 613 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 615 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **99,92 %** dengan kriteria **Cukup**.





**TABEL 3.32**  
**HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI**  
**SD TRIWULAN I TAHUN 2024**

No	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap	Rekomendasi	9	9	100
2	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi SK	Laporan	0	0	0
3	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB	Rekomendasi	6	6	100
4	Rekomendasi Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Besar dan Menengah	Rekomendasi	41	40	97,56
5	Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Mikro dan Kecil	Sertifikat	63	63	100
6	Hasil Pemeriksaan Verifikasi Penerbitan IP CPPOB Skala Usaha Mikro dan Kecil	Laporan	60	60	100
7	Hasil Pemeriksaan Audit Surveilans SMKPO	Laporan	1	1	100
8	Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB	Sertifikat	25	25	100






No	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
9	Hasil Pemeriksaan OT/ SK dalam rangka pendaftaran produk impor	Laporan	0	0	0
10	Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetika	Rekomendasi	8	8	100
11	Penerbitan SKI/ SKE Produk Pangan Olahan	Surat Keterangan	176	175	99,43
12	Sertifikat Hasil Pengujian Pihak Ketiga	Sertifikat	267	267	100
TOTAL			656	654	99.70

### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.33

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI  
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78%	99.7%	99,92%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 99,78%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 99,7% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 99,92% dengan kriteria AKAN TERCAPAI.

### **C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 belum memenuhi dari target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan antara lain :

- Pada triwulan I, terdapat perubahan sistem persetujuan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dimana saat ini dapat langsung diterbitkan tanda-tangan elektronik pada sistem e-bpom sehingga pada awal



penggunaan masih terdapat kendala sehingga timeline yang ditetapkan tidak tercapai .

- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menindaklanjuti catatan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).
- Capaian penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Usaha Mikro Kecil yang tinggi pada tahun sebelumnya sehingga menyebabkan jumlah sarana yang harus diverifikasi pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan / *workshop*/bimtek/ diseminasi/webinar mengenai CPPOB dan CPKB sehingga seluruh personil Tim Kerja Sertifikasi terpenuhi seluruhnya.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek dan Desk CAPA.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang dalam pencapaian kinerja:

- Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring timeline beserta progressnya.
- Melaksanakan kegiatan Bimtek Pendampingan UMK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari – 01 Maret 2024 di Aula Balai Besar POM di Bandung dengan mengundang para pelaku usaha UMK Obat Tradisional dan Kosmetik.



Gambar 3.11 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Kosmetika dan Obat Tradisional

- Melaksanakan kegiatan Bimtek Pendampingan UMK yang dilaksanakan pada tanggal 07 – 08 Maret 2024 di Kota Bandung dengan mengundang para pelaku usaha UMK Pangan Olahan



Gambar 3.12 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- Pendampingan/fasilitasi sertifikasi melalui layanan KABAYAN ataupun telekonsultasi kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA Hasil Pemeriksaan.

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindakanlanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.34

#### **MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”**

Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
a	Kompetensi SDM terus ditingkatkan, terutama personil baru sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ seminar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB, dan CDOB.	Personil baru mengikuti pelatihan pembentukan inspektur junior OT/SK serta pelatihan evluasi audit internal di sarna peredaran pangan olahan bagi evaluator SMKPO.	Pelatihan personil untuk Inspektur CPKB Junior	Des 2024	Kompetensi SDM yang masih kurang mengakibatkan proses evaluasi menjadi lambat	Kompetensi SDM yang sesuai dengan standar dapat mempercepat proses evaluasi dan ketepatan putusan penilaian
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu	-	-	Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan ketentuan sertifikasi masih rendah sehingga proses	Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan ketentuan sertifikasi sudah lebih baik sehingga proses



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
		penyelesaian dokumen sertifikasi			perbaikan dan pemenuhan persyaratan memerlukan waktu yang lebih lama	perbaikan dan pemenuhan persyaratan memerlukan waktu yang lebih cepat
c	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.	-	-	Tidak adanya monitoring dan pengendalian terhadap program kegiatan, sehingga pelaksanaannya tidak efektif dan efisien	Monev yang dilaksanakan secara rutin dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Fungsi sertifikasi membuat program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendaftaran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini pemenuhan persyaratan sertifikasi oleh pelaku usaha menjadi lebih cepat, sehingga penilaian sertifikasi dapat diselesaikan oleh petugas sesuai dengan waktunya.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.




#### 4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2024.

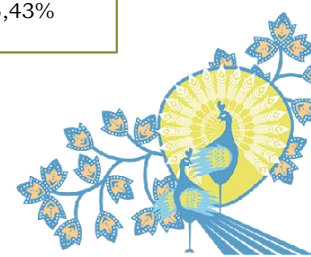
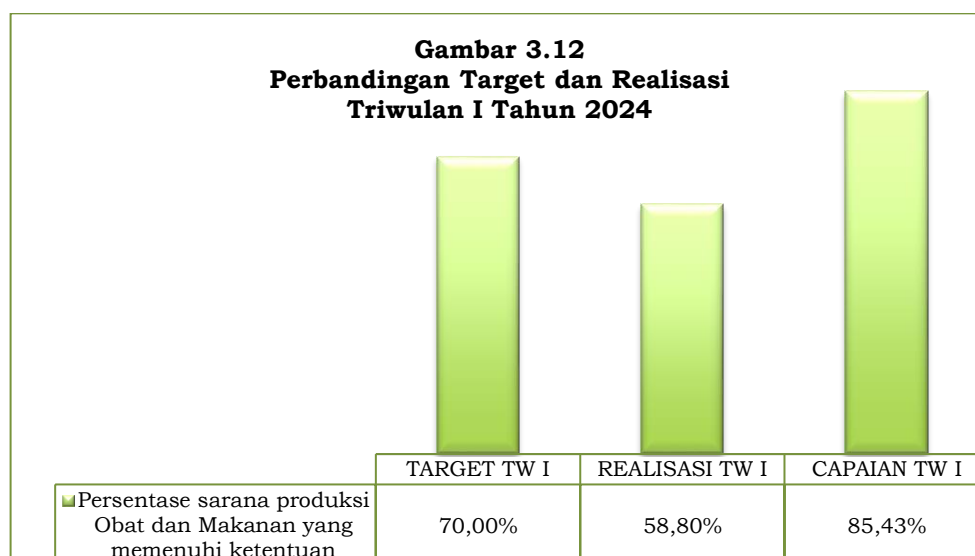
TABEL 3.35

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN  
YANG MEMENUHI KETENTUAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00%	59,80%	85,43%	CUKUP	

##### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 70.00%. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar **59,80%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **85,43%** dengan kriteria **CUKUP**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 61 sarana dari 102 sarana yang telah diperiksa sampai dengan Triwulan I tahun 2024.






**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis indikator ini adalah sebesar 70%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 85,43%.

TABEL 3.36  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN  
YANG MEMENUHI KETENTUAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00%	59,80%	85,43%	AKAN TERCAPAI	

Target tahun 2024 indikator sasaran strategis ini ditetapkan sebesar 70,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tahun 2024, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 85,43% dengan kriteria AKAN TERCAPAI.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan ke Depan)**

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Pemeriksaan sarana bersama pusat dalam rangka penelusuran, penelusuran kasus pengaduan, pelaksanaan penghentian sarana kegiatan (PSK) sarana berpotensi menurunkan nilai IKU sehingga tidak semua pemeriksaan sarana dilaporkan dalam SIPT.
- Temuan ketidaksesuaian yang masih cukup tinggi di sarana produksi obat dan sarana produksi pangan (MD) yang diperiksa berdasarkan rencana pelaksanaan yang disusun berbasis risiko.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana.

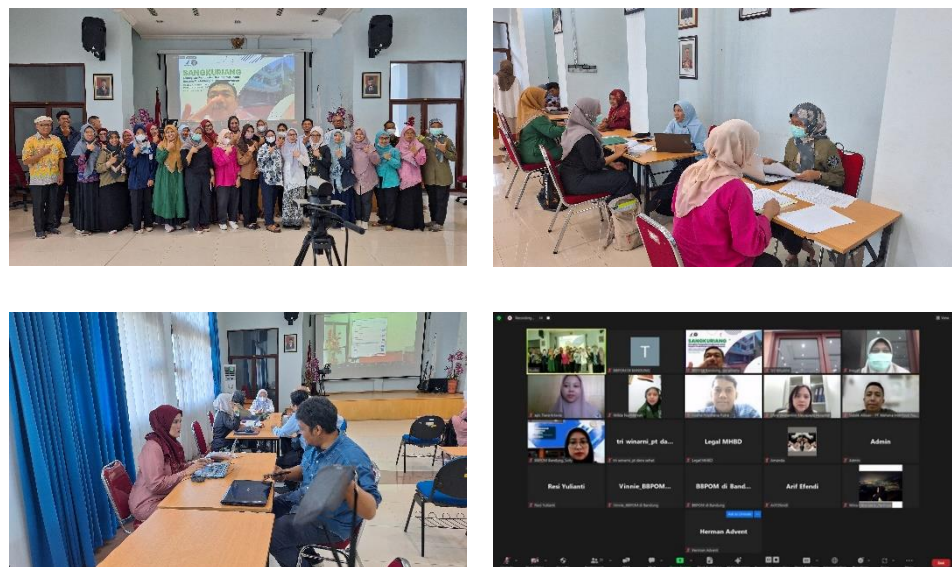


- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

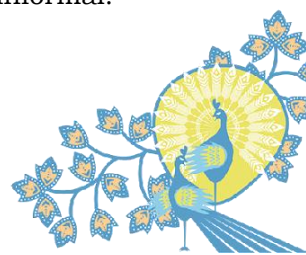
Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

- Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan pada bulan Maret 2024 sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.



Gambar 3.13. Desk CAPA

- Pemberian sosialisasi kepada lintas sektor terkait pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten. Sosialisasi dan Bimbingan teknis yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :
  - c) Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
  - d) Narasumber kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kabupaten Bandung.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dilaksanakan secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.



#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.37

### MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

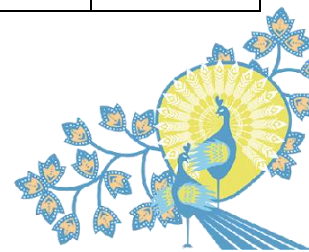
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”

s/d TRIWULAN I TAHUN 2024

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) lebih ditingkatkan	Desk CAPA secara hybrid daring dan luring tanggal 25 Maret 2024	Kegiatan Sangkuring lanjutan	Triwulan II, III dan IV	Hasil inspeksi sarana produksi dan Distribusi belum di Tindak Lanjuti secara maksimal	Hasil inspeksi Sarana produksi dan Distribusi sudah di Tindak lanjuti secara maksimal
b	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi Obat dan Makanan telah dilaksanakan sd Triwulan I	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi Obat dan Makanan secara konsisten dilaksanakan	Triwulan II, III dan IV	Tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan Distribusi belum ada monitoring sehingga ada hasil inspeksi yang belum di Tindak lanjuti	Tindak lanjut hasil inspeksi saran sudah termonitor, sehingga semua inspeksi dapat di Tindak lanjuti
c	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan kepada pelaku usaha setiap kali dilakukan pemeriksaan sarana</li> <li>Informasi email kantor dicantumkan dalam surat TL</li> </ul>	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi baik secara daring ataupun	Triwulan II, III dan IV	Pelaku usaha tidak dapat memberika n perbaikan /Tindak lanjut dari hasil	Pelaku usaha memahami dan mengetahui cara pembuatan CAPA, sehingga dapat

Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			luring terkait kewajiban untuk <i>compliance</i> terhadap peraturan dan bagaimana menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		inspeksi, dikarena tidak memahami ketentuan dan cara perbaikannya	melakukan Tindak Lanjut dari hasil inspeksi
d	Peningkatan Kompetensi Petugas	<ul style="list-style-type: none"><li>Bimtek CPOTB Junior yang diselenggarakan Bulan Maret 2024</li></ul>	Mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan bimtek yang diadakan oleh internal maupun eksternal	Triwulan II, III dan IV	Petugas belum memiliki kompetensi dan pemahaman yang berbeda sehingga Tindak lanjut nya bervariasi	Petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman tindak lanjut, sehingga hasil inspeksi dapat di tindak lanjuti
f	Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan	Integrasi aplikasi monitoring pengawasan hasil dan tindak lanjut CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Integrasi pengawasan sarana dengan aplikasi manajemen kinerja	Triwulan II Tahun 2024	Monev hasil pemeriksaa n secara manual sehingga masih terdapat hasil inspeksi yang belum ditermonito r dengan baik	Monev hasil pemeriksaan lebih terkendali sehingga hasil inspeksi dapat di TL dapat dimonitor lebih maksimal termasuk pemenuhan timelinenya



#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan dengan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi SATU POM JABAR. Dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.


#### G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

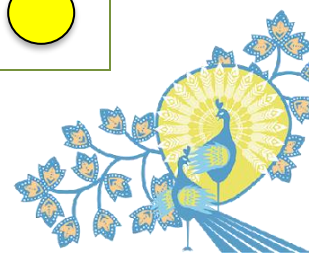
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### 5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2024 dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2024.

TABEL 3.38  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN  
YANG MEMENUHI KETENTUAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat dan	81,00%	79.96%	98.72%	CUKUP	





Makanan yang memenuhi ketentuan					
---------------------------------	--	--	--	--	--

#### A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2024 ditetapkan sebesar **81,00%** sedangkan realisasinya adalah sebesar **79.96%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **98.72%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 363 sarana dari 454 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.



#### B. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Triwulan I Dengan Target Tahun 2024

TABEL 3.39

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN  
YANG MEMENUHI KETENTUAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00%	79.96%	98.72%	TERCAPAI	▲

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis indikator ini adalah sebesar **81%**. Jika realisasi kinerja pada triwulan I



dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan II sebesar **98.72%** dengan kriteria **TERCAPAI**.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan Atas Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Ke Depan)**

Penurunan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Pemenuhan kepatuhan GDP sarana distribusi obat dan makanan kurang memadai.
- Ditemukan beberapa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pemeriksaan sarana distribusi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan baik dari masyarakat yang disampaikan melalui unit layanan pengaduan konsumen (ULPK), lintas sektor dan pusat
- Penambahan jumlah sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan karena adanya pelaksanaan intensifikasi pengawasan, yaitu:
  - a) Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan/atau mengandung Bahan Kimia Obat pada Depot Jamu yang diselenggarakan pada bulan September minggu kedua sampai dengan minggu keempat
  - b) Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Klinik dan sarana peredaran pangan yaitu persentase sarana yang memenuhi ketentuannya kurang dari 78%, bahkan beberapa sarana PBF, Apotek dan klinik mendapatkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop, bimtek, diseminasi atau *sharing session* mengenai CDOB, pengelolaan obat di



sarana pelayanan kefarmasian SMKPO dan BUPN/Importir kosmetik dan pedoman tindak lanjutnya.

- Sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP.
- Membangun database Hasil Pemeriksaan Sarana untuk memudahkan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

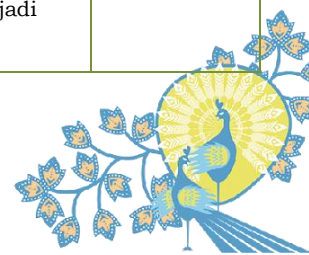
- Pembuatan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi berdasarkan skala prioritas hasil dari analisis resiko.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana. Setiap minggu dilakukan monitoring terhadap capaian pemeriksaan sarana yang diinput melalui google drive koordinasi jadwal dinas.
- Desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
- Menyampaikan permintaan dokumen CAPA kepada pelaku usaha

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.40  
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI  
 “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN  
 YANG MEMENUHI KETENTUAN”

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
a	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	Pembinaan kepada pelaku usaha setiap kali dilakukan pemeriksaan sarana Informasi email kantor dicantumkan dalam surat TL  Desk CAPA secara daring dan luring tanggal 30 Maret 2024	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi baik secara daring ataupun luring terkait kewajiban untuk <i>compliance</i> terhadap	Triwulan II, III dan IV	Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan masih kurang sehingga implementasi GDP menjadi	Pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan lebih baik, sehingga implementasi GDP menjadi lebih konsisten



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			peraturan dan bagaimana menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		tidak konsisten	
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada sarana untuk menyampaikan CAPA Monitoring CAPA secara berkala	Monitoring pelaksanaan <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA) untuk sarana distribusi Obat dan Makanan	Triwulan II, III dan IV	Perbaikan CAPA pelaku usaha belum dimonitoring dengan baik	Perbaikan CAPA sudah termonitoring dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha
f	Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan	Membangun database melalui pengisian google form data kunjungan dan pengisian bersama pada gdrive rekap data kunjungan	Integrasi pengawasan sarana dengan aplikasi manajemen kinerja	Triwulan II, III dan IV	Monev hasil pemeriksaa n belum efektif sehingga perbaikan pelaku usaha dalam implementasi GDP tidak efektif	Monev hasil pemeriksaan sudah efektif sehingga perbaikan pelaku usaha dalam implementasi GDP lebih efektif

#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.



- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi yang Baik.

#### **G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### **6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

**TABEL 3.41**  
**KATEGORI PENILAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK**

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik





4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
-------------	---	-----------------

Target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung Tahun 2024 adalah 4,45 dan akan dihitung pada akhir tahun.

## 7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.


Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik



(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

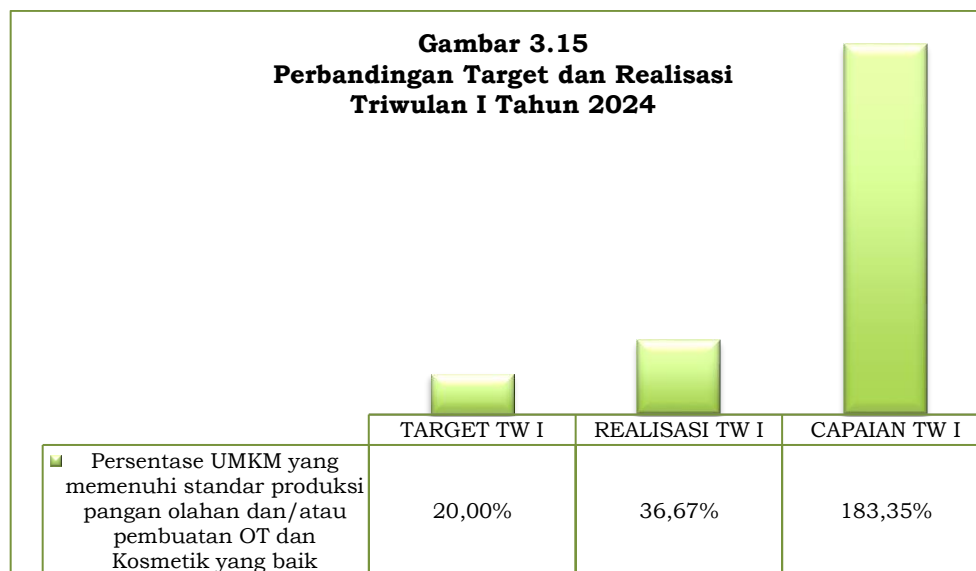
**TABEL 3.42**

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI  
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20.0% (Progress)	36,67% (Progress)	183,35%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

**A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja `Triwulan I Tahun 2024**

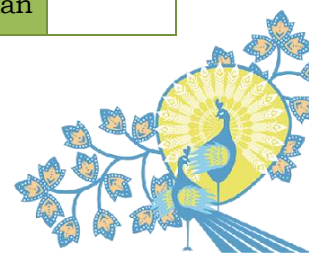
Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 79% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan bimtek UMKM pangan dan mulai melaksanakan kegiatan fasilitasi pendampingan UMKM.



**TABEL 3.43**

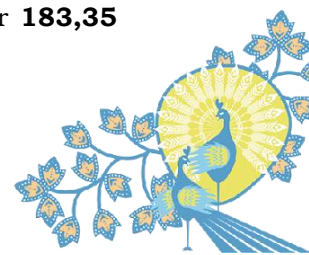
**TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT**

	TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
--	---------	-------	-----------------	--------------------	--



Obat Tradisiona 1	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Januari-Februari	Target Jumlah 4
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	April-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
Total Progres						
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari-Februari	Target Jumlah 7
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Maret-April	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	April-November	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	Desember	
Total Progres						
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Februari	Target Jumlah 27
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	Maret-April	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	April-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

Pada TW 1 di tahun 2024, target untuk TW 1 adalah sebesar 30% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 terealisasi 36,67 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **183,35 %** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.



**TABEL 3.44**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, OT DAN**  
**KOSMETIK**  
**SD TRIWULAN I TAHUN 2024**

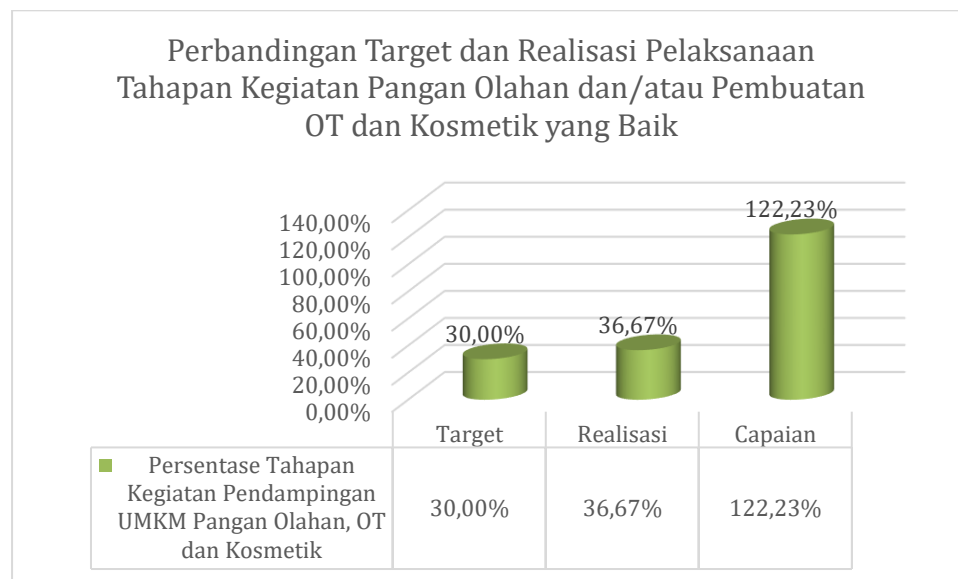
No	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	27	10%	20%	30%
2	Obat Tradisional	4	10%	20%	30%
3	Kosmetik	7	10%	40%	50%
TOTAL					36,67%

#### **B. Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada TW I di tahun 2024, target tahapan pelaksanaan pendampingan/fasilitasi untuk TW I adalah sebesar 30% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan tahapan kegiatan pendampingan UMKM pada TW I adalah 36,67%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan Bimtek UMKM. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **122,23 %**.

Persentase Target Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM tahun 2024 sebesar 30% pada TW I. Jika capaian pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I adalah sebesar 123,23%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.16.





Gambar 3.16

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 81% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan (progress) yang telah dilakukan.


Pada TW 1 di tahun 2024, target untuk TW 1 adalah sebesar 20% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 36,67%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan bimtek UMKM dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **183,35%**.





**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

TABEL 3.45  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI  
 YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81.0% (Progress)	36,67% (Progress)	45,27%	PERLU UPAYA KERAS	

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81,00%. Untuk target akhir (UMKM yang memenuhi standar), pada TW I ini baru dilaksanakan penetapan target pendampingan yaitu menentukan sarana-sarana UMKM yang akan dijadikan target pendampingan dan fasilitasi di tahun 2024, sehingga pada TW 1 belum dapat dihitung realisasi capaian terhadap target tahun 2024. Sedangkan untuk tahapan kegiatannya, pada TW 1 realisasi pelaksanaan pendampingan sebesar 36.67% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 45,27% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan Atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada triwulan I tahun 2024 adalah memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut :

- Rekrutemen dalam rangka pendampingan UMKM Tahun 2024 sudah dilakukan sejak bulan November 2023 sehingga pada awal tahun 2024 sudah dapat dilakukan penetapan target untuk menentukan sarana UMKM yang akan didampingi
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM untuk sarana UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional sudah berjalan sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:



- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM oleh masing-masing fasilitator terhadap sarana UMKM yang didampinginya.
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

**E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.
- Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.



- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik.
- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap.
- Adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan
- Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Pada tanggal 28-29 Februari 2024 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 8 UMKM kosmetik. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.





Gambar 3.17 Bimtek Pendampingan UMKM Kosmetik



3.18 Bimtek Pendampingan UMKM Obat Tradisional

- Pada tanggal 7-8 Maret 2024 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis



Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara



luring untuk 27 UMKM pangan olahan. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan persyaratan pendaftaran pangan olahan.



*Gambar 3.19 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan*



*Gambar 3.20 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan*

#### **F. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti terkait pelaksanaan persentase umkm yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:





- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku usaha tersebut.
- Mengikutsertakan petugas fasilitator umkm dalam pelatihan terkait pembinaan UMKM.
- Menjalin kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM

#### **G. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Fungsi sertifikasi membuat program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendaftaran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini pelaku usaha akan lebih mudah dan cepat untuk dapat memenuhi standar cara produksi yang baik.

#### **H. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN KEGIATAN KE-5** **MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **76,47%** dengan kriteria **CUKUP**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.46.

TABEL 3.46  
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,60	96,16	99,54	CUKUP	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00 (Progress)	6,93 (Progress)	34,65	KURANG	
3. Jumlah desa pangan aman	15,00 (Progress)	14,50 (Progress)	96,67	CUKUP	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00 (Progress)	15,00 (Progress)	75,00	CUKUP	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			76,47%	CUKUP	

**1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat



persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-OT.03.02.2.22.04.24.295 Tanggal 16 April 2024 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2024.


Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

TABEL 3.47  
 KATEGORI PENILAIAN  
 “TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”  
 TAHUN 2024

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali



TABEL 3.48  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

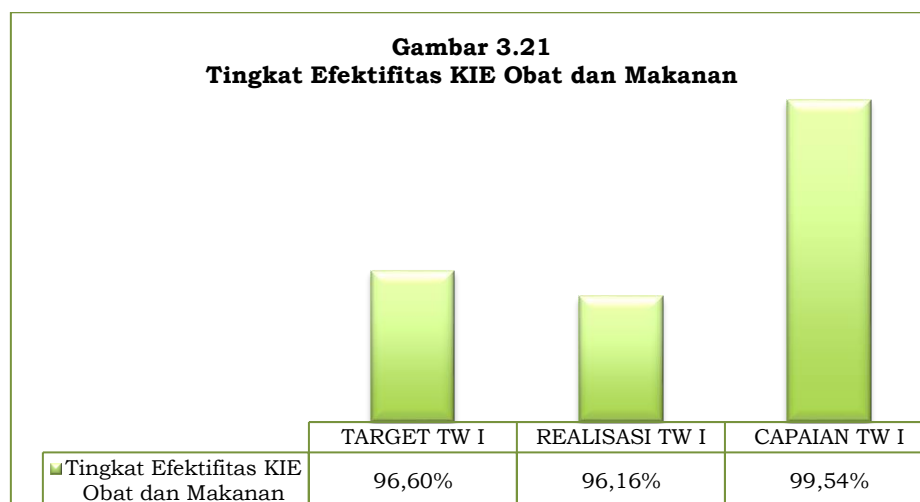
INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,16	99,54	CUKUP	

Dari hasil perhitungan indeks efektivitas KIE Balai Besar POM di Bandung triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah total responden sebanyak 658 orang
2. Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2024 diperoleh indeks 96,16 (**Sangat Efektif Sekali**). Capaian tersebut belum memenuhi target tahun 2024 yaitu sebesar 96,6 (99,54%). Rincian indeks per indikator sebagai berikut: a. Ragam kegiatan sebesar 98,43; b. Pemahaman sebesar 98,44; c. Manfaat sebesar 96,81;d. Minat sebesar 88,79.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024


Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 96,60. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2024 sebesar **96,16** (Sangat Efektif Sekali) di bawah Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **99,54%** dengan kriteria **CUKUP**.



**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96,6. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **99,54%** dengan kriteria **Akan Tercapai**.

TABEL 3.49  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,16	99,54	AKAN TERCAPAI	

**C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

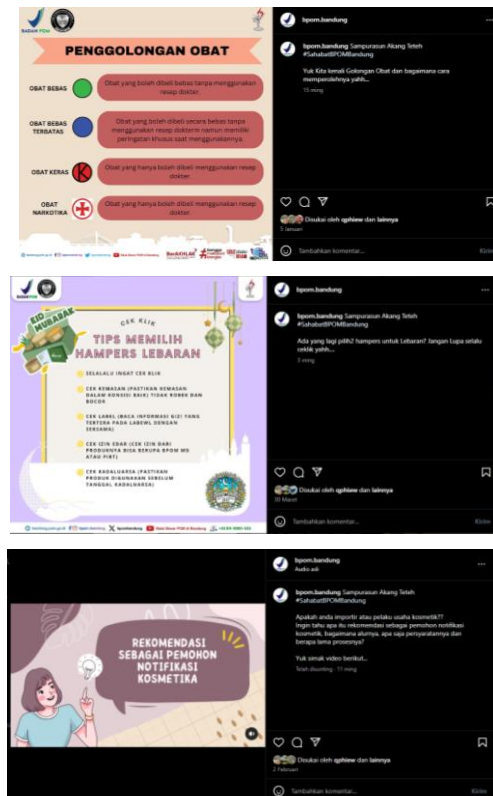
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

1. Melakukan KIE melalui sosial media melalui infografis dan videografis baik di Facebook maupun Instagram.
2. Melakukan KIE bekerjasama dengan pihak radio Hardrock FM berupa Talkshow.
3. Melakukan KIE melalui SMS Blast, Media Outdoor dan Moda Transportasi.
4. Melakukan KIE melalui Media Outdoor.
5. Melakukan KIE bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat.
6. Melakukan KIE bekerjasama dengan pramuka.
7. Melakukan KIE melalui Podcast dan Talkshow.







Gambar 3.22 KIE Infografis dan Videografis pada Medsos bulan Januari, Februari dan Maret 2024

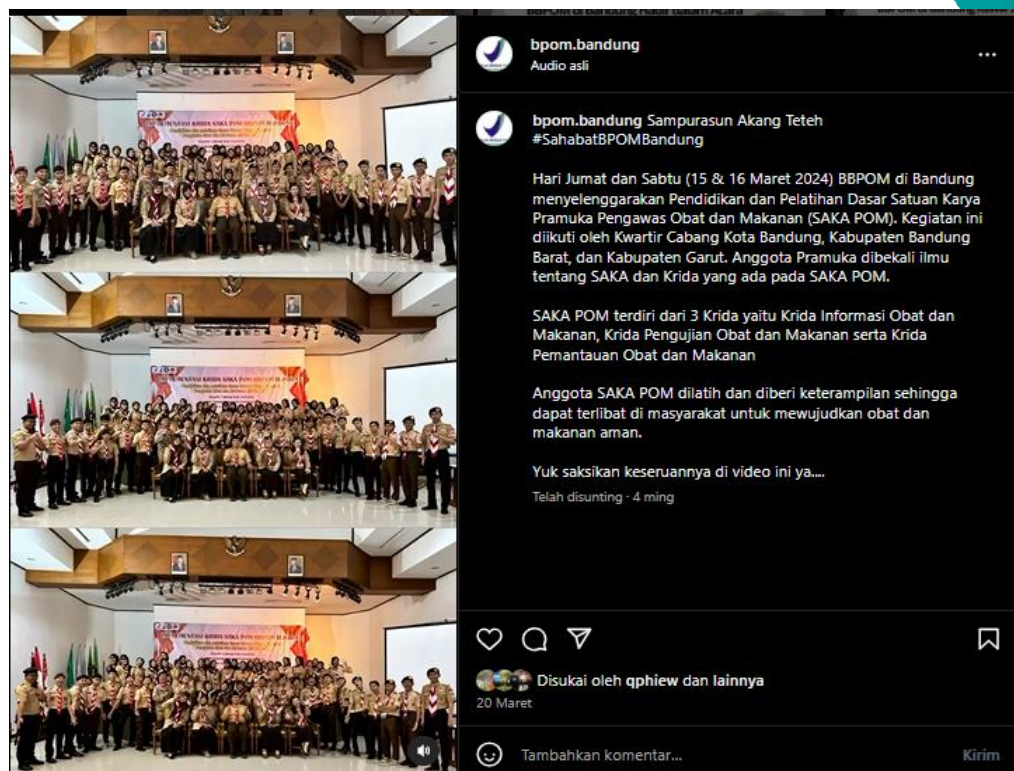


Gambar 3.23 KIE melalui SMS Blast tanggal 21 Maret 2024

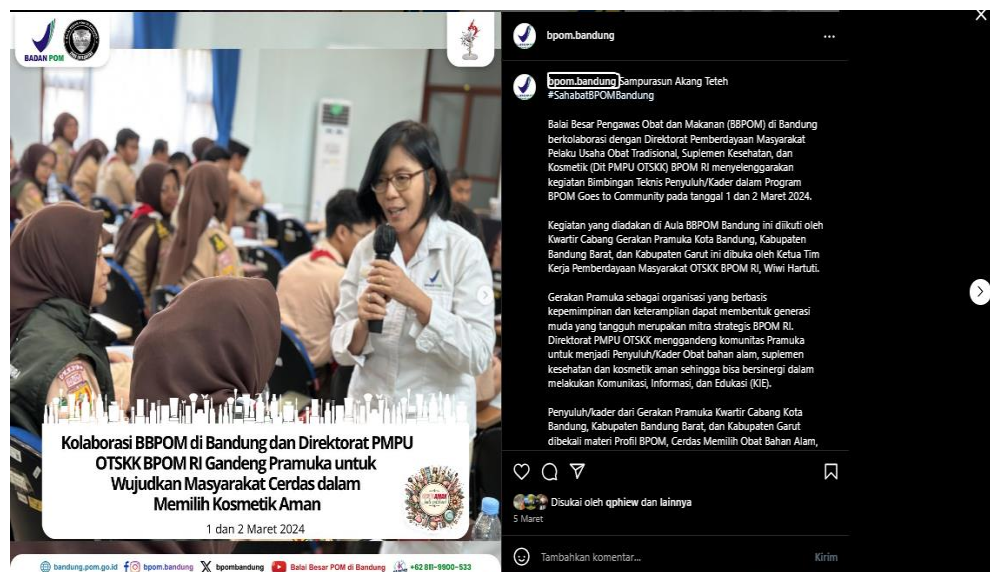


Gambar 3.24 Kegiatan Talkshow bersama Radio Hardrock FM tanggal 25 Maret 2024





Gambar 3.25 KIE bekerjasama dengan Pramuka melalui Kegiatan Diklat Dasar SAKA POM tanggal 15 dan 16 Maret 2024



Gambar 3.26 Kolaborasi KIE BBPOM di Bandung dengan Direktorat PMPU OTSKK Badan POM bersama Pramuka tanggal 1-2 Maret 2024





Gambar 3.27 KIE bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat bulan Januari dan Februari 2024

#### D. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti terkait pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2024 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE
- Melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
- Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden
- Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
- Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain
- Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
- Menjaga konsistensi kegiatan melalui media sosial

#### E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, meliputi :





- Pelaksanaan KIE bekerjasama dengan Pramuka melalui Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM).
- Melakukan intensifikasi pelaksanaan KIE, dan juga diversifikasi media informasi yang digunakan. Karena dengan semakin banyaknya media informasi yang diakses oleh masyarakat, akan menaikkan nilai efektifitas KIE tersebut.


**F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN**

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

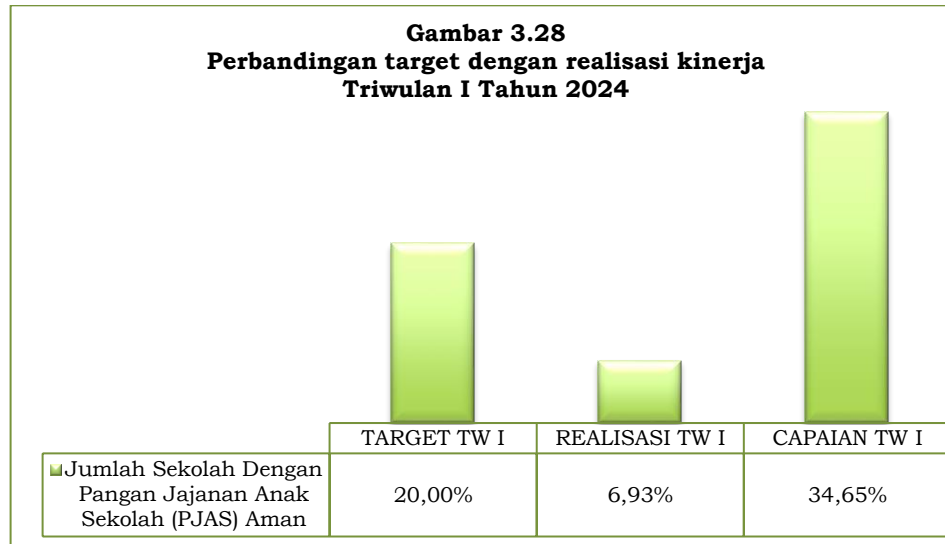
TABEL 3.50  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN  
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00 (Progress)	6.93 (Progress)	34,65	KURANG	

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2024 adalah 138 sekolah. Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2024 adalah progress 20%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar progress 6.93%, dimana pada triwulan I ini telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS di Kabupaten Cianjur dan pengawalan 2 sekolah tahun 2023 di Kabupaten Garut. Jika diukur antara realisasi terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar 34,65% dengan kriteria **KURANG**.





Intervensi yang dilakukan bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sector, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman yang dilaksanakan di 26 sekolah di Kabupaten Cianjur (9 sekolah), Kabupaten Subang (8 sekolah) dan Kota Bekasi (9 sekolah). Serta dilakukan pengawalan di 112 sekolah di kabupaten/kota yang sudah diintervensi pada tahun 2020-2023, yaitu Kabupaten Indramayu (5 sekolah), Kabupaten Kuningan (11 sekolah), Kabupaten Sumedang (5 sekolah), Kabupaten Majalengka (5 sekolah), Kabupaten Purwakarta (4 sekolah), Kabupaten Karawang (4 sekolah), kabupaten Cirebon (4 sekolah), Kota Cirebon (4 sekolah), Kabupaten Ciamis (9 sekolah), Kota Banjar (9 sekolah), kabupaten Pangandaran (8 sekolah), Kota Sukabumi (8 sekolah), Kabupaten Garut (9 sekolah), Kabupaten Sukabumi (10 sekolah), Kabupaten Bekasi (9 sekolah) dan Kota Cimahi (8 sekolah). Sehingga jumlah target sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 adalah 138 sekolah. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.





**TABEL 3.51**  
**RENLAK DAN MONEV PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS TAHUN 2024**


KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS sd TW 1
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	6.67	0	0	0	6.67
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	0	0	0	0
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah</li> <li>Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah</li> </ul>	15	0	0	0	0	0
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	0	0	0	0	0
7 Pengawalan (112 sekolah)	10	0.26	0	0	0	0
<b>TOTAL SKOR</b>	<b>100</b>	<b>6.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.93</b>

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 138 sekolah (target progress pada TW I adalah 6.93%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 6,93% sehingga apabila dikonversi ke jumlah sekolah, realisasi pada triwulan I adalah 10 sekolah dengan capaian kinerja sebesar 34,65%.



TABEL 3.52  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “JUMLAH SEKOLAH DENGAN  
 PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138 Sekolah 100%	6.93%	6.93%	AKAN TERCAPAI	

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring pelaksanaan program terhadap target pelaksanaan Badan POM
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program Sekolah dengan PJAS Aman

**D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I 2024 adalah sebagai berikut :

- Advokasi lintas sektor Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kabupaten Cianjur disertai penandatanganan komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Kabupaten Cianjur tentang Program Sekolah dengan PJAS Aman tanggal 22 Maret 2024
- Pengawalan 2 sekolah tahun 2023 di Kabupaten Garut pada tanggal 22 dan 25 Maret 2024





Gambar 3.29 Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan di kabupaten Cianjur tanggal 22 Maret 2024



Gambar 3.30 Penandatanganan Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Kabupaten Cianjur



Gambar 3.31 Pengawasan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023 di Kabupaten Garut





#### **E. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan, sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, dan semua tahapan dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program kegiatan ini dapat dirasakan dan dapat direplikasi oleh pemda di sarana lokasi yang lain.


#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### **3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN**

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. Hasil dari keseluruhan proses Audiensi dan Advokasi dengan pihak Pemda Kab/Kota yg diintervensi, Desa yang diintervensi meliputi 3 desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Kompa, Sukaraja dan Pasir Halang, 2 desa di Kabupaten Garut yaitu Desa Neglasari dan Giri Makmur; 2 desa di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Kertarahayu dan Ciantra; 2 Kelurahan di Cimahi yaitu Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Leuwi Gajah.

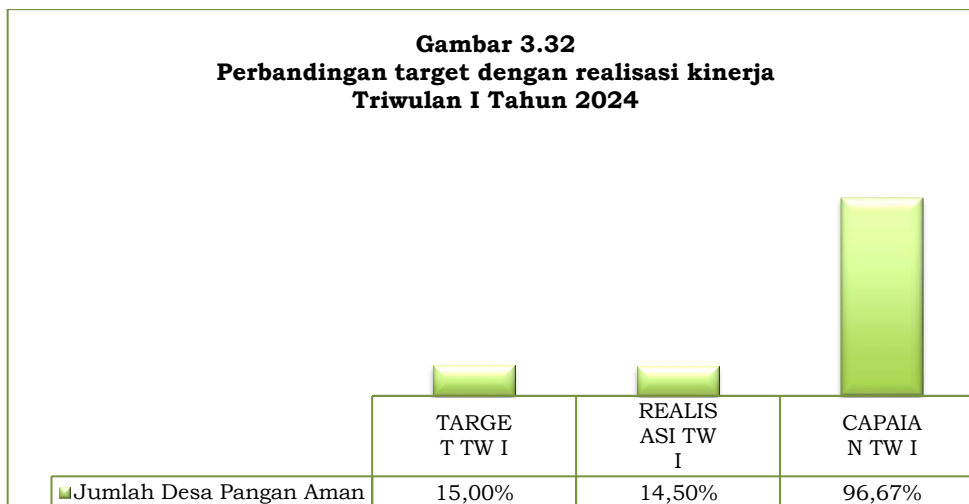
**TABEL 3.53**  
**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR**  
**“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	15 % Progress	14,5 % Progress	96.67%	CUKUP	



**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2024 adalah 45 Desa. Target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2024 adalah progress 15%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar progress 14,5% Progress . Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **96,67%** dengan kriteria **CUKUP**.



TABEL 3.54  
 PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN  
 SD TAHUN 2024


KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	6.7	0	0	0	6,7
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	0	0	0	0	0
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	0	0	0	0	0
4	Bimtek Komunitas	15	0	0	0	0	0
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
7	Monitoring dan Evaluasi	15	0	0	0	0	0
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10	7.84	0	0	0	7,84
<b>TOTAL SKOR</b>		<b>100</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**



Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar progress 15%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **70%** dengan kriteria **Akan Tercapai**.

TABEL 3.55  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “JUMLAH DESA PANGAN AMAN”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah Desa Pangan Aman	45 Desa Progres 100%	14,5%	14,5%	Akan Tercapai	



Gambar 3.33 Penandatanganan Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Kab Cianjur tentang Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan





Gambar 3.34 Advokasi Kelembagaan Desa Kab Cianjur

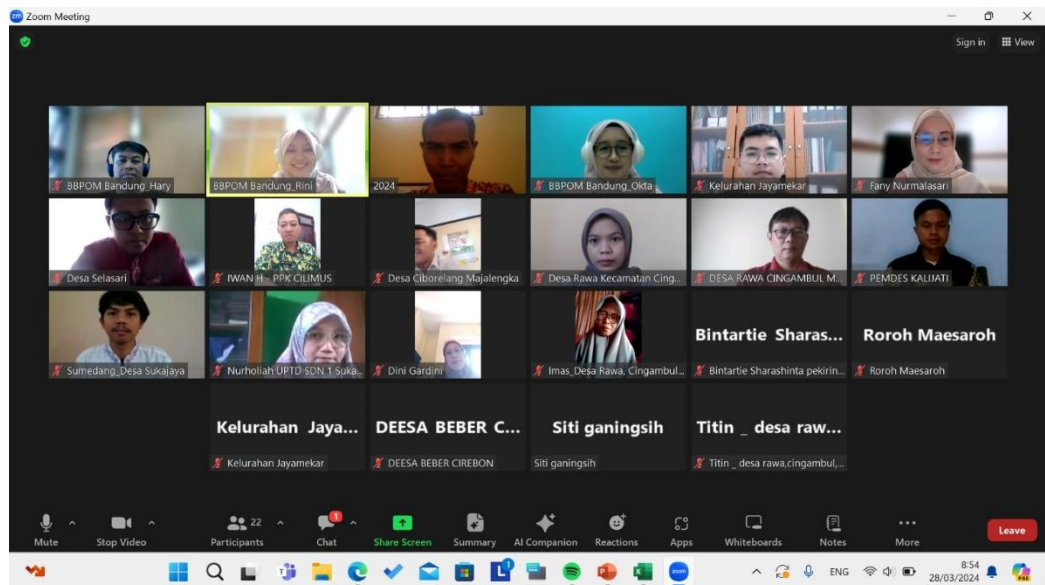


Gambar 3.35 Advokasi Kelembagaan Desa Kab Cianjur





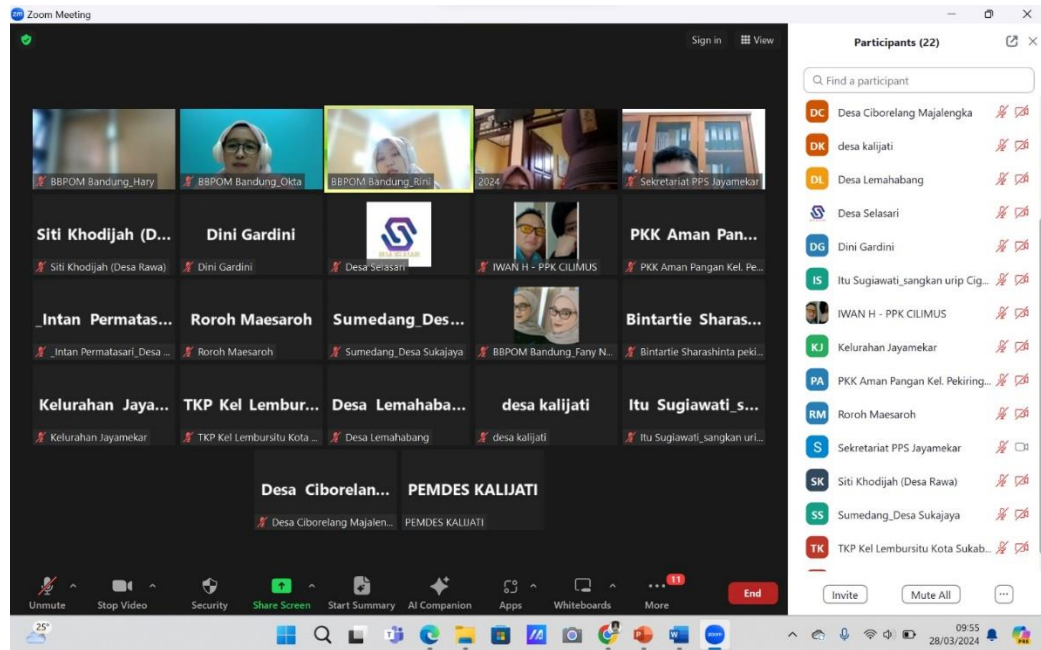
Gambar 3.36 Bimtek Pengawalan Desa Tahun 2020-2022 melalui Zoom Meeting tanggal 28 Maret 2024



Gambar 3.37 Bimtek Pengawalan Desa Tahun 2020-2022 melalui Zoom Meeting tanggal 28 Maret 2024







Gambar 3.38 Bimtek Pengawasan Desa Tahun 2020-2022  
melalui Zoom Meeting tanggal 28 Maret 2024

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Justifikasi tidak tercapainya target Desa Pangan Aman Triwulan I yaitu :

- Secara prinsip Pelaksanaan Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan juknis yang telah di buat oleh pusat. Monitoring progress program dilakukan sesuai dengan juknis tersebut.
- Menurut juknis pusat ditargetkan Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa dilaksanakan hingga bulan Mei 2024 (target 20%). Namun sampai TW 1, advokasi kelembagaan baru dilaksanakan pada 1 Kabupaten/ Kota (Kabupaten Cianjur) sehingga realisasi hingga TW 1 sebesar 6.7%.
- Kegiatan Pengawasan Desa yang telah diintervensi tahun 2020-2022 (nilai kegiatan 10%) telah dilaksanakan melalui secara daring. Dari 37 desa yang diundang untuk dilakukan pengawasan, hanya 15 desa yang berpartisipasi dalam kegiatan zoom meeting, sedangkan sisanya dilakukan pengawasan melalui *whatsapp grup*. Dan sudah dilakukan pula pengawasan 1 desa yang diintervensi tahun 2023 di kabupaten Bekasi. Sehingga jumlah realisasi pengawasan sebesar 7.84%.
- Jadwal kegiatan lain yang dikelola kelompok substansi antara lain KIE dengan Tokoh Masyarakat yang cukup padat di awal tahun (Januari-Februari 2024), menyerap sumber daya manusia yang kebetulan juga pelaksana program Desa Pangan Aman. Sehingga penjadwalan Program Desa Pangan agak terhambat



- Koordinasi dengan Pemda Kota Bekasi dalam rangka audiensi agak terhambat dan belum terrealisasi dikarenakan kesibukan dari Pejabat Daerah setempat

Upaya Koreksi dan Preventive/Perbaikan dan pencegahan keberulangan :

- Dilakukan efisiensi penjadwalan/penugasan personil agar semua program berjalan sesuai dengan perencanaan
- Dilakukan monitoring terhadap progress pelaksanaan program Desa Pangan Aman lebih ketat untuk memastikan program terlaksana sesuai juknis

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya perbaikan dan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya keberulangan pada Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Dilakukan efisiensi penjadwalan/penugasan personil agar semua program berjalan sesuai dengan perencanaan
- Dilakukan monitoring terhadap progress pelaksanaan program Desa Pangan Aman lebih ketat untuk memastikan program terlaksana sesuai juknis
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat khususnya Pemda Kota Bekasi

#### **E. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan, sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, dan semua tahapan dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program kegiatan ini dapat dirasakan dan dapat direplikasi oleh pemda di sarana lokasi yang lain.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

### **4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS**


Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya,





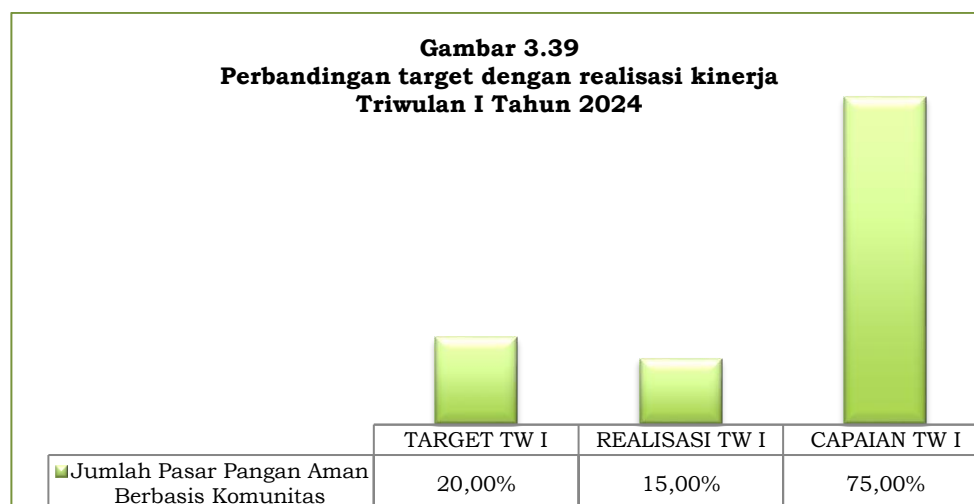
mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang mendapat intervensi tahun 2024 adalah Pasar Cipanas Kabupaten Cianjur, Pasar Purwadadi Kabupaten Subang, dan 1 pasar dari Kota Bekasi.

TABEL 3.56  
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
 “JUMLAH PASAR AMAN DARI BERBASIS KOMUNITAS”  
 TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar aman dari Berbasis Komunitas	20% Proses	15% Proses	75%	CUKUP	

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2024 adalah 3 pasar. Target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2023 adalah progress 15%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 15% Proses. Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **75%** dengan kriteria **CUKUP**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada tabel berikut.




TABEL 3.57  
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR AMAN  
DARI BAHAN BERBAHAYA  
SD TRIWULAN I TAHUN 2024

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Survei Pasar	5	3,3	0	0	0	3,3
2 Advokasi dengan lintas sektor	20	6,7	0	0	0	6,7
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	0	0	0	0	0
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15	0	0	0	0	0
5 Penyuluhan Pedagang Pasar	10	0	0	0	0	0
6 Kampanye Komunitas Pasar	10	0	0	0	0	0
7 Sampling dan Pengujian Tahap II	15	0	0	0	0	0
8 Pengawasan Pasar Aman (Bimtek 2020-2023, sampling dan pengujian pasar intervensi 2023)	10	5	0	0	0	5
<b>TOTAL SKOR</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 3 Pasar (progress 100%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **15%** dengan kriteria **Akan Tercapai**.

TABEL 3.58  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“JUMLAH PASAR AMAN DARI BERBASIS KOMUNITAS”  
TRIWULAN III TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	3 Pasar Progress 100%	15%	15%	AKAN TERCAPAI	



**C. Analisis Penyebab Keberhasilan atas Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring pelaksanaan program terhadap target pelaksanaan BPOM
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

**D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tahap survei pasar telah dilaksanakan pada Pasar Cipanas Kabupaten Cianjur tanggal 19-20 Maret 2024 dan Pasar Purwadadi kabupaten subang pada tanggal 21-22 Maret 2024. Survei pasar di Kota Bekasi belum dilaksanakan.
- Advokasi kepada pemerintah daerah Kab. Cianjur dilaksanakan pada 20-21 Maret 2024. Advokasi kepada pemerintah Kabupaten Subang dan Kota belum dilaksanakan pada TW I.
- Tahap pengawalan dilaksanakan pada Bulan Maret 2024. Pengawalan berupa penyegaran Bimtek petugas pengelola pasar yang diintervensi tahun 2023 yaitu Pasar Atas Kota Cimahi, Pasar Baraya Desa Kabupaten Garut, Pasar Parungkuda dan Pasar Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Pada kegiatan pengawalan dijelaskan kembali tentang tatacara sampling dan pengujian menggunakan *rapid test kit*, tatacara pelaporan, dan informasi tentang sampling yang dilaksanakan oleh petugas pasar. Sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan akan dilaksanakan pada Bulan April-Mei 2024.







Gambar 3.40 Survei Pasar Cipanas  
Kab. Cianjur



Gambar 3.41 Survei Pasar Muka  
Kab. Cianjur



Gambar 3.42 Survei Pasar Purwadadi Kab.  
Subang



Gambar 3.43 Survei Pasar  
Pusakajaya Kab. Subang



Gambar 3.44 Penandatanganan  
Komitmen oleh Bupati Cianjur H.  
Herman Suherman, S.T., M.A.P



Gambar 3.45 Advokasi di Kab.  
Cianjur





Gambar 3.46 Pengawasan Pasar Parungkuda dan Pasar Sukaraja di Kab. Sukabumi



Gambar 3.47 Pengawasan Pasar Atas Kota Cimahi



Gambar 3.48 Pengawasan Pasar Tambun Kab. Bekasi







Gambar 3.49 Pengawasan Pasar Baraya Desa Kab. Garut

#### E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut. Berdasarkan informasi kinerja didapatkan bahwa pengelola pasar mengalami kesulitan dalam menentukan parameter pengujian dan kesulitan menentukan hasil pengujian, sehingga perlu metode penyampaian materi yang mudah. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan membuat materi dalam video singkat. Video edukasi dapat disebarluaskan kepada pengelola pasar yang diintervensi tahun 2020-2023 melalui *Whatsapp*. Video edukasi mempermudah pelaksanaan pengawasan, sehingga luring, kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara daring melalui *zoommeeting* dan *Whatsapp*.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

#### F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



## SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT KEGIATAN DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KE-6 KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101,79%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.59 berikut.

TABEL 3.59  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	17,66%	88,30%	Cukup	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	23,06%	115,28%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101,79%	SANGAT BAIK	

### 1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor




izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.60

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

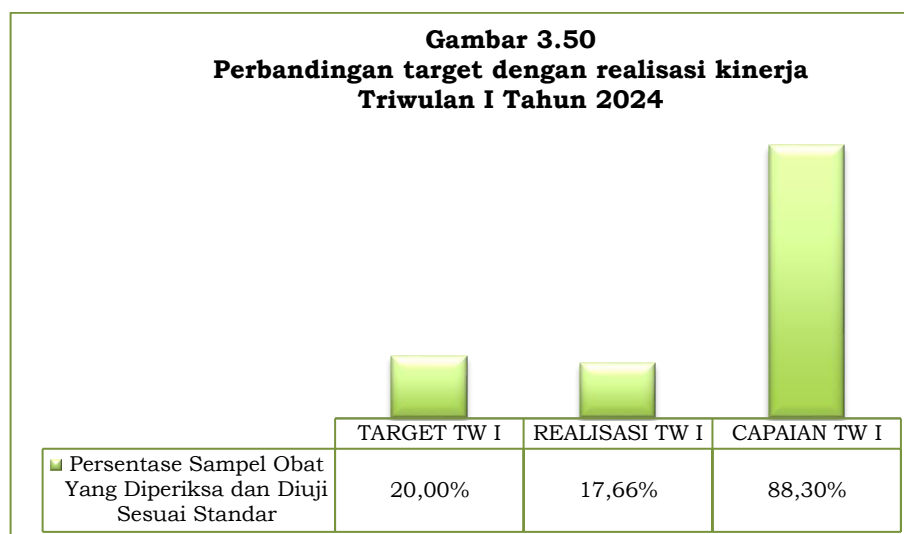
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”

TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	17,66%	88,30%	Cukup	

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada triwulan I, jumlah sampel obat yang disampling 531 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 461 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 17,66%. Target pada triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 20,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **88,30%** dengan Kriteria **Cukup**.




**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**

Target indikator ini pada akhir tahun 2024 yang ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 17,66%.



TABEL 3.61  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI  
STANDAR”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100.00%	17.66%	17.66%	PERLU UPAYA KERAS	

**C. Analisis Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

- Target yang ditetapkan untuk sampel yang diperiksa adalah 25,00% dan realisasinya baru sebesar 20,84% (531 sampel dari 2548 sampel yang ditargetkan dalam setahun). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan I adalah 15,00% dan realisasinya baru sebesar 14,48% (461 sampel dari 3184 sampel yang diuji). Sehingga realisasi triwulan I untuk indikator kinerja ini sebesar 17,66%.
- Sampel obat yang disampling bulan Januari tahun 2024 baru dilakukan pada akhir bulan sehingga sampel selesai uji baru dihitung di bulan Februari 2024. Untuk sampel kosmetik baru mulai disampling pada bulan Februari 2024 karena terkendala renlak sampling dan pengujian yang belum siap di awal tahun. Komoditi sampel kosmetik ini paling banyak diantara sampel komoditi obat lainnya yaitu sebanyak 1440 sampel. Sehingga mempengaruhi jumlah sampel yang selesai uji yaitu hanya sebesar 14.48% dari target 15% selesai uji pada triwulan I.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024, antara lain:

- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 BBPOM di Semarang dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS, Microwave, dan AAS yang



dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan sehingga proses pengujian lebih efisien dan efektif.

- Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP secara bertahap terutama pembelian peralatan utama seperti GCMS, KCKT, microwave digester, serta alat-alat penunjang laboratorium lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang kegagalan pencapaian kinerja, antara lain :

- Sampel obat yang disampling bulan Januari tahun 2024 baru dilakukan pada akhir bulan sehingga sampel selesai uji baru dihitung di bulan Februari 2024. Untuk sampel kosmetik baru mulai disampling pada bulan Februari 2024 karena terkendala renlak sampling dan pengujian yang belum siap di awal tahun. Komoditi sampel kosmetik ini paling banyak diantara sampel komoditi obat lainnya yaitu sebanyak 1440 sampel. Sehingga mempengaruhi jumlah sampel yang selesai uji yaitu hanya sebesar 14.48% dari target 15% selesai uji pada triwulan I.
- Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan kurang optimal khususnya renlak sampling dan pengujian pada triwulan I.



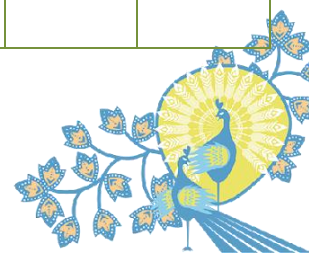


**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.62  
 MATRIKS TINDAK LANJUT  
 “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI  
 STANDAR”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

Rekomendasi		TindakanJut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.		Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2024 adalah 80.72%	Desember 2024	Nilai pemenuhan peralatan tahun 2023 sebesar 78.86%	
b	Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.		Dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,	Desember 2024	Timeline pengujian tahun 2023 sebesar 98,13%	



Rekomendasi		Tindakan lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	rencana Aksi	Rencana Aksi
			Kosmetik dan Pangan			
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.		Akan dilakukan Bimbingan Teknis Internal Laboratoriu m Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatn, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi	Desember 2024	Nilai pemenuhan standar kompetensi tahun 2023 sebesar 90.93%	
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.		Meningkatkan pengendalian monev timeline pengujian obat tahun 2024	Desember 2024	Timeline pengujian obat tahun 2023 sebesar 98,13%	

#### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat Data Inspeksi...
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan



mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai money penarikan data hasil pengujian bulanan

- o Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


### **2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR**

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

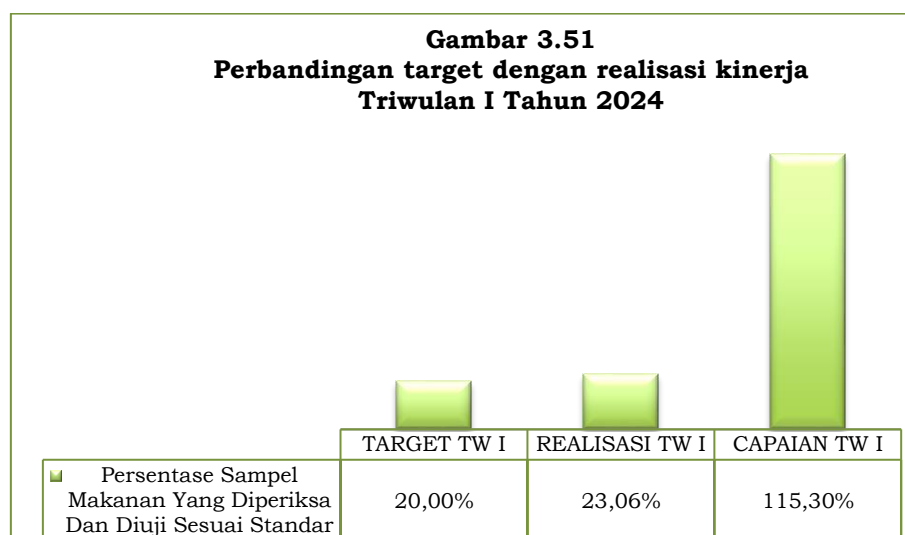


TABEL 3.63  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA  
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	23,06%	115,28%	SANGAT BAIK	

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2024 sebesar 23,06% dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 27,63% (sebanyak 299 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1082 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 18,48% (sebanyak 279 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1510 sampel). Dengan demikian realisasi TW I sebesar 23,06% dan capaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 115,28% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.



**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024**


Target indikator ini pada akhir tahun 2024 yang ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi



kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 23,06%.

TABEL 3.64

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR**  
**“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA**  
**DAN DIUJI SESUAI STANDAR”**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100.00%	23,06%	23,06%	PERLU UPAYA KERAS	

**C. Analisis Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Kegagalan pencapaian pada triwulan I tahun 2024 ini disebabkan oleh:

- Sampai dengan triwulan I tahun 2024 hasil pengujian sampel makanan yang diperiksa dan diuji baru 18.47% (279 sampel dari total 1510 sampel) sehingga belum menggambarkan hasil pengujian secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024, antara lain :

- Review target triwulan untuk indikator kinerja sampel Makanan yang diuji sesuai standar.
- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.





**D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

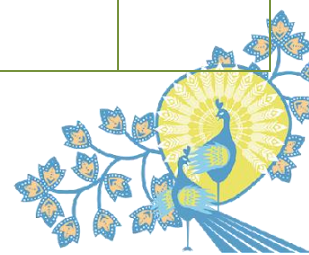
- Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.65  
Matriks Tindak Lanjut  
“PERSentase Sample Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar”  
TAHUN 2024

Rekomendasi		Tindakanjutt		Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline		Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2024 adalah 80.72%	Desember 2024	Nilai pemenuhan peralatan tahun 2023 sebesar 78.86%	



Rekomendasi		Tindaklanjuti		Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.					
b	Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.		Dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	Desember 2024	Timeline pengujian tahun 2023 sebesar 98,13%	
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.		Akan dilakukan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatn, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi	Desember 2024	Nilai pemenuhan standar kompetensi tahun 2023 sebesar 90.93%	
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.		Meningkatkan pengendalian monev timeline pengujian makanan tahun 2024	Desember 2024	Timeline pengujian makanan tahun 2023 sebesar 99,59%	

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat



- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - o Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komoditi lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - o Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

#### **G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN**  
**KEGIATAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA**  
**KE-7 BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **154,23%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.66.

TABEL 3.66  
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,00%	33,93%	154,23%	TIDAK DAPAT DISIMPULKA N	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			154,23%	TIDAK DAPAT DISIMPULKA N	

**PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI**  
**BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro legal berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang



dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksanaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

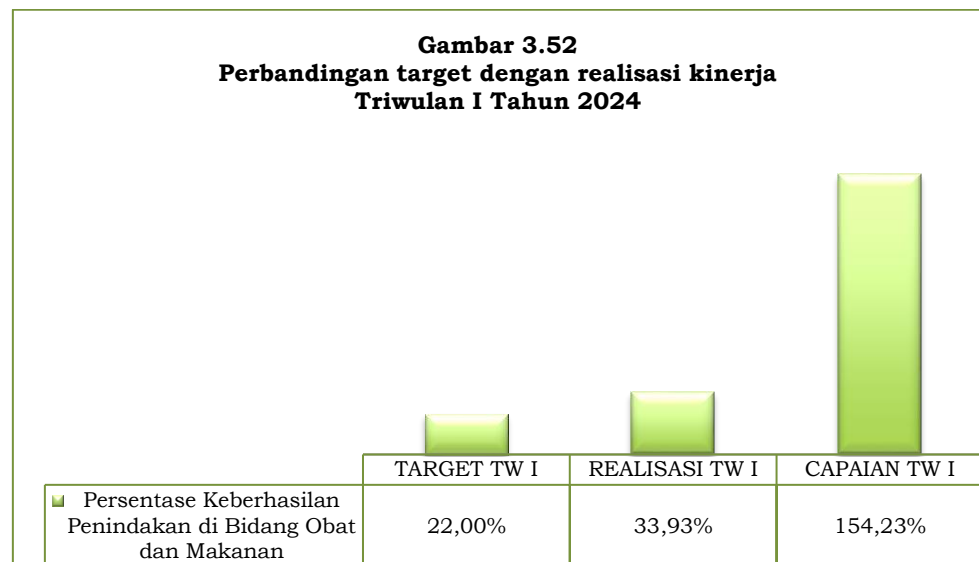
- SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan – nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada sasaran kegiatan ini adalah sebesar 22,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 33,93% sehingga capaian sasaran kegiatan ke-7 sebesar **154,23%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.




#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Target indikator ini pada akhir tahun 2024 yang ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 adalah sebesar 80,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 42.42%.





TABEL 3.67  
 CAPAIAN KINERJA  
 PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DIBIDANG  
 OBAT DAN MAKANAN  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	80.00%	33.93%	42.42 %	PERLU UPAYA KERAS	

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan atas Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran ini pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain:

- Adanya jejaring informasi dalam pengumpulan bahan keterangan yang baik, sehingga didapatkan informasi awal yang akurat terkait terjadinya tindak pidana Obat dan Makanan. Pada bulan Maret 2024 dilakukan operasi penindakan terhadap 2 (dua) sarana yang diduga melakukan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dimana informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana tersebut berasal dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI.
- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan lintas sektor, yaitu Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, sehingga tahap pelaksanaan operasi penindakan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan ICJS yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu se-optimal mungkin. Koordinasi dilakukan salah satunya melalui audiensi Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di kantor BBPOM di Bandung pada bulan Februari 2024.

Alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:



- Melakukan komunikasi terbatas dalam penentuan target investigasi dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan
- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui infokom dan diteruskan ke kelompok subatansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- Memelihara koordinasi dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya untuk membuat kesepakatan dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan
- Melakukan koordinasi intensif dengan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk setiap berkas perkara yang sedang ditangani agar penyelesaian berkas dapat dilakukan secara efektif dan efisien
- Mengingat bahwa capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 sebesar **154,23%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka perlu dilakukan penyesuaian target Triwulan II tahun 2024 berdasarkan laporan kemajuan perkara yang sedang ditangani. Adapun target Triwulan II tahun 2024 diusulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 44,0 % dari semula 39,0 %

#### D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam mendukung tercapainya indikator sasaran ini, dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan.

- Penyidikan Obat dan Makanan

Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada Triwulan I tahun 2024, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 4 perkara yang dilakukan proses projusticia dan telah diterbitkan SPDP.

Perkara yg ditangani Bidang Penindakan terdiri dari 2 perkara memproduksi dan/atau mengedarkan produk sediaan farmasi tanpa ijin edar dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan 2 perkara produksi pangan yang menggunakan bahan



yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam pangan. 2 Perkara peredaran sediaan farmasi dan 1 perkara pangan sedang dalam proses pemberkasan sementara 1 perkara pangan lainnya sedang dalam proses menuju P-21 dimana perbaikan atas P-19 telah dilaksanakan.

- **Investigasi Awal**

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patrol siber).

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.68

**MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI**  
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN  
HASIL PENGAWASAN SD TRIWULAN I TAHUN 2024”

Rekomendasi				Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum			
					Rencana Aksi	Timeline		
a	Peningkatan jumlah SDM PPNS			Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2024	-	Triwulan I dan IV	Jumlah SDM yang berstatus PPNS belum memadai, sehingga perlu dilakukan penambahan personal PPNS	Telah diterima undangan dari PPSDM BPOM RI untuk mengikuti diklat Pembentukan PPNS Badan POM RI Tahun 2024. 1 personil akan mengikuti diklat



Rekomendasi		Tindaklanjuti			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
						pembentukan tersebut. Diajukan penambahan personal PPNS melalui diklat sejenis selama tahun 2024 untuk 1 personil lainnya.
b	Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Criminal Justice System (CJS) pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif	Koordinasi intensif dan komprehensif tidak hanya dengan level Struktural tetapi juga dengan Jaksa Peneliti	-	Triwulan I dan IV	Pemahaman dan dukungan CJS masih pada level struktural (Aspidum dan Kepala Seksi) dan belum merata kepada seluruh Jaksa Peneliti yang ditunjuk, sehingga masih ada kendala dalam penyelesaian beberapa berkas perkara	Pemahaman dan dukungan CJS dalam penindakan perkara Obat dan Makanan, sudah semakin baik, sehingga beberapa perkara yang sempat terkendala telah mengalami kemajuan dalam penanganan berkasnya

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi penindakan melakukan upaya peningkatan proses dan sarana maupun perlengkapan pelaksanaan kegiatan, meliputi :



- Proses pengumpulan bahan keterangan dan informasi yang lebih baik dan komprehensif, sehingga dapat menemukan adanya kejadian tindak pidana bidang Obat dan Makanan.
- Kelengkapan peralatan yang digunakan dalam kegiatan investigasi awal, sehingga dapat membantu kesuksesan kegiatan. Akibatnya informasi, data, dan bukti terjadinya tindak pidana dapat diketahui dan dikumpulkan.

**G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





## SASARAN KEGIATAN KE-8

## TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 3 (tiga) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedelapan, sebagai berikut:

TABEL 3.69  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
	TW I	TW I	TW I		
1. Indeks RB BBPOM di Bandung	-	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun	-
2. Indeks AKIP BBPOM di Bandung	-	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun	-
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			-	Diukur Pada Akhir Tahun	-

### 1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM



adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

## **2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG**

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

## **3. NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN**

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.



**SASARAN  
KEGIATAN  
KE-9**

**TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG  
BERKINERJA OPTIMAL**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

TABEL 3.70  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	-	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			-	-	-

**INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

Pengukuran IP-ASN tahun 2024 diukur pada akhir Triwulan I menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Namn demikian, berbagai kegiatan tetap dilaksanakan pada Triwulan III untuk meningkatkan realisasi kinerja, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**  
Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 1 Tahun 2024 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.
- **Kompetensi:**



Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional PFM, Usulan Uji Kompetensi Perencana Pertama dan Madya.

- **Kinerja:**

Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP tahun 2023 menggunakan aplikasi SIMAKIN

- **Disiplin:**

Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala. Diharapkan proses pencapaian kinerja pada akhir tahun sesuai target, dan proses keberhasilan di Triwulan I dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**

BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada tahun 2024 terdapat sejumlah 4 Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar dan 1 pegawai Ijin Belajar.

- **Kompetensi:**

Pemenuhan persyaratan target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai

- **Kinerja:**

Capaian Kinerja seluruh Pegawai seluruhnya baik berdasarkan Penilaian atasan langsung, sangat dipengaruhi kompetensi manajerial masing-masing atasan

- **Disiplin:**

Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung

Tindak Lanjut terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah mempertahankan dan meneruskan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, serta mengembangkan kegiatan penunjang lainnya seperti Peningkatan Kompetensi untuk Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional PFM.





**SASARAN  
KEGIATAN  
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN DATA  
DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Namun pada triwulan I, yang diukur hanya Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **102,86%** dengan kriteria **Sangat Baik** Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.71.

TABEL 3.71  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Diukur pada akhir tahun	-
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	2,9	96,67%	CUKUP	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			96,67%	CUKUP	

**1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT  
DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP**

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan





Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
- Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

3. Penilaian Standar Peralatan

- Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Untuk capaian kinerja belum bisa dihitung karena pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini, dilakukan pada akhir tahun anggaran 2024. Sampai dengan triwulan I nilai assessment P3OMN untuk pemenuhan SKL sebesar 87.94% dengan rincian sebagai berikut:




- 1) Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 91.50%
- 2) Pemenuhan Standar Kompetensi sebesar 91.61%
- 3) Pemenuhan Standar Peralatan sebesar 90.72%

## **2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/dimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

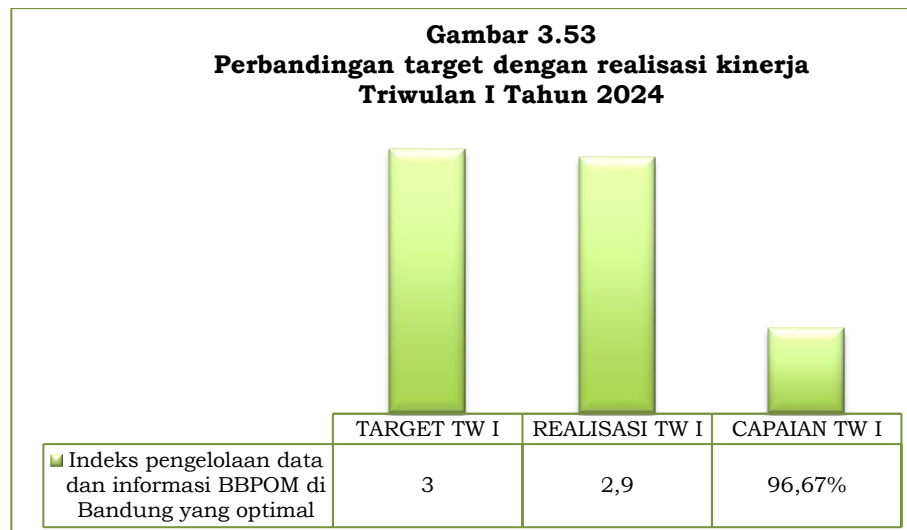
TABEL 3.72  
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	2,9	96,67%	CUKUP	



#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3 sedangkan realisasinya sebesar 2,9. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 2,75 dan komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 3. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **96,67%** dengan kriteria Cukup.



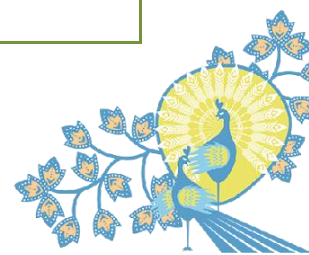
#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 3 (tiga). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I sebesar **96,67%** dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.73

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	2,9	96,67%	AKAN TERCAPAI	



**C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/  
Penurunan Kinerja Serta alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Penyebab kecenderungan kenaikan kinerja pada triwulan I tahun 2024, sebagai berikut:

- Penggunaan absensi apel dan kegiatan melalui email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: Pada TW I akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan meningkat
- Berita Aktual: Pada TW I ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual, dengan jumlah berita yang diunggah cukup banyak yaitu 13 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id serta sosialisasi serta informasi di media sosial masih perlu terus ditingkatkan untuk lebih optimalnya akses subsite tersebut.
- SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada TW I; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi.

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

- Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta akses wajib aplikasi mySAPK menggunakan email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.

**D. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Sebelumnya**

- Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

**E. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan ini, dibentuk Tim ITIK yang akan memonitor dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi di



BBPOM di Bandung. Beberapa program yang dilakukan dalam meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, meliputi :

- Membuat aplikasi event yang terintegrasi dengan email corporate pegawai, sehingga setiap yang akan mengikuti kegiatan daam event tersebut akan membuka email corporate dan pemanfaatan email tersebut menjadi lebih baik.
- Meningkatkan dan Mengoptimalkan pemanfaatan berita aktual, media social dan aplikasi lain untuk mendukung terlaksananya kegiatan di Balai Besar POM di Bandung.

#### **F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





**SASARAN  
KEGIATAN  
KE-11**

**TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG  
SECARA AKUNTABEL**

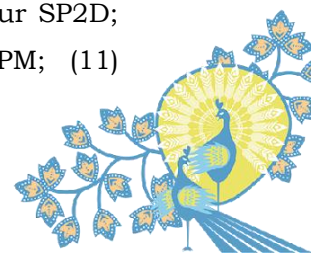
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari keempat indikator tersebut, belum dapat dihitung nilai pencapaiannya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.74.

TABEL 3.74  
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11  
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	45	48,32	107,38	SANGAT BAIK	
2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-
4. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			-	-	-

**1. NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman II DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11)



Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 45,00. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung triwulan I tahun 2024 sebesar 48,32 (50% x Nilai IKPA), dengan rincian, nilai IKPA sebesar 96,63. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas belum dapat dihitung.

TABEL 3.75

“NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)  
 BBPOM DI BANDUNG”  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	095	063	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	92.28	100.00	100.00	100.00	86.52	100.00	95.00	96.63	100%	96.63
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.23	20.00	10.00	10.00	8.65	5.00	23.75			
					Nilai Aspek	96.14				97.30			95.00			

#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Dengan Target Tahun 2024

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,60. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I terhadap target tersebut 48,32, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (97,98%).

TABEL 3.76

CAPAAN KINERJA NILAI KINERJA ANGGARAN  
 TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	CAPAAN TW I	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.60%	48,32	50,54	PERLU UPAYA KERAS

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- Serapan anggaran BBPOM di Bandung pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.20.214.980.571,- terhadap pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp.60.149.475.000,- (36,31%).



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya secara luring menjadi daring atau hybrid. Serta percepatan pengadaan barang dan jasa yang sudah dimulai pada Bulan Januari 2024.
- Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja dan Ketua Tim yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan triwulan berikutnya.



Gambar 3.54

Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

#### E. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- Menyusun Plan of Action (POA) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2024 agar dapat mencapai target capaian kinerja sesuai dengan RAPK Tahun 2024 dan target serapan anggaran.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator pembentuk EKA dan IKPA antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.
- Telah dilakukan penyusunan Plan of Action (POA) Kegiatan berdasarkan DIPA dan POK Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD), dan pada triwulan I telah dilakukan Revisi Anggaran di Kanwil DJPB salah satunya melakukan revisi Halaman III DIPA.
- Percepatan proses pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang sudah dimulai pada awal tahun anggaran.
- Menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang diselenggarakan setiap bulan untuk menetapkan tindaklanjut yang dilakukan pada bulan berikutnya.
- Upaya percepatan penyampaian dokumen/pertanggungjawaban keuangan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode selanjutnya adalah:

- Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.





- Memastikan penyerapan anggaran triwulan sesuai dengan target (15%-40%-60%-99%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
- Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2024 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
- Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan.
- Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
- Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
- Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

#### **F. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi Tata Usaha membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan SOP alur pertanggungjawaban keuangan, untuk meningkatkan pengendalian berkas pertanggungjawaban, monev, mempercepat waktu proses pencairan, dan mengurangi kesalahan dokumen pertanggungjawaban.

#### **G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

## **2. NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA**

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu: Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun





anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%); Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%); Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%); Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75,28.

### **3. NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik.

Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%) ; a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut :

- Tanggal penerimaan  $> H+3$  : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$  : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$  : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan  $\leq H-3$  : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut :

- Tanggal penerimaan  $> H+3$  : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$  : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$  : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan  $\leq H-3$  : Sangat tepat waktu ( Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status



penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:  $(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$ . Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui/total barang rusak berat  $\times 100 \%$ . Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak  $\times 100 \%$ . Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84.

#### **4. PRESENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60.



### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 60.149.475.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.089.044.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.060.431.000,-. Pada triwulan I tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 20.214.980.571,- (33.61%).

TABEL 3.77

#### REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	28.089.044.000	12.603.240.447	44.87%
Program Dukungan Manajemen	32.060.431.000	7.611.740.124	23.74%
<b>TOTAL</b>	<b>60.149.475.000</b>	<b>20.214.980.571</b>	<b>33.61%</b>

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.78

#### ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2.990.036.000	152.001.347	5.08%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	114.100.000	0	0%



NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.386.316.000	21.440.544	1.55%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	4.222.952.000	964.883.576	22.85%
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	14.264.057.000	10.946.105.190	76.74%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	749.678.000	5.370.000	0.72%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.498.983.000	178.806.000	11.93%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4.670.970.000	981.253.370	21.01%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26.380.562.000	6.496.243.464	24.63%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	2.516.254.500	270.188.710	10.74%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	1.355.566.500	198.688.370	14.66%
<b>TOTAL</b>		<b>60.149.475.000</b>	<b>20.214.980.571</b>	<b>33.61%</b>

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 14.264.057.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.946.105.190,- dengan capaian 76.74%.



- 2) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 26.380.562.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.496.243.464,-, dengan capaian 24.63%.
- 3) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 4.222.952.000,- dan realisasi sebesar Rp. 964.883.576,- dengan capaian 22.85%.
- 4) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 4.670.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 981.253.370,- dengan capaian 21.01%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 1.355.566.500,- dan realisasi sebesar Rp. 198.688.370,- dengan capaian 14.66%.
- 6) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.498.983.000,- dan realisasi sebesar Rp. 178.806.000,- dengan capaian 11.93%.
- 7) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu sebesar Rp. 2.516.254.500,- dan realisasi sebesar Rp. 270.188.710,- dengan capaian 10.74%.
- 8) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 2.990.036.000,- dan realisasi sebesar Rp. 152.001.347,-, dengan capaian 5.08%.
- 9) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.386.316.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.440.544,-, dengan capaian 1.55%.
- 10) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 749.678.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.370.000,- dengan capaian 0.72%.
- 11) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 114.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian 0%.





Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.735.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.095.164.766,- dengan capaian 58.33%.
- 2) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.923.353.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.946.373.914,- dengan capaian 22.75%.
- 3) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.490.452.000,- dan realisasi sebesar Rp. 173.441.891,- dengan capaian 3.86%.

TABEL 3.79  
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN  
*PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD*  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2024

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2.990.036.000	152.001.347	5.08%	4.490.452.000	173.441.891	3.86%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	114.100.000	0	0%			



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.386.316.000	21.440.544	1.55%			
<b>INTERNAL PROCESSES PERSPECTIVE</b>	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	4.222.952.000	964.883.576	22.85%	20.735.670.000	12.095.164.766	58.33%
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	14.264.057.000	10.946.105.190	76.74%			
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	749.678.000	5.370.000	0.72%			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.498.983.000	178.806.000	11.93%			



Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4.670.970.000	981.253.370	21.01%	34.923.353.000	7.946.373.914	22.75%
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26.380.562.000	6.496.243.464	24.63%			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	2.516.254.500	270.188.710	10.74%			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	1.355.566.500	198.688.370	14.66%			
<b>NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN</b>			<b>60.149.475.000</b>	<b>20.214.980.571</b>	<b>33.61%</b>	<b>60.149.475.000</b>	<b>20.214.980.571</b>	<b>33.61%</b>

Pada triwulan I, RPD yang tercantum dalam Halaman I DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 22.753.845.926,-, maka deviasi sebesar 7.72 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

**TABEL 3.80**  
**HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
JANUARI	9.58	9.57	0.01	BAIK
FEBRUARI	22.92	22.49	0.44	BAIK
MARET	34.84	30.31	4.53	BAIK



Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- Triwulan I, sebesar minimal 40 persen;
- Triwulan II, sebesar minimal 60 persen; dan
- Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.81  
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024

Target Realisasi Anggaran TW I	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian
25%	33.61%	134.44%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

**Apabila  $IE \geq SE$ : kegiatan efisien**  
**Apabila  $IE < SE$ : kegiatan tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.82**  
**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI**  
**BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,53%	4,05%	24,31	23,31	TIDAK EFISIEN
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,06%	7,33%	11,61	10,61	TIDAK EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,45%	4,06%	24,22	23,22	TIDAK EFISIEN
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,49%	7,62%	12,26	11,26	TIDAK EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,11%	9,95%	11,17	10,17	TIDAK EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	100,44%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	5,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	-	0,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30%	8,70%	11,41	10,41	TIDAK EFISIEN
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	107,03%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,92%	24,08%	4,15	3,15	EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,43%	22,61%	3,78	2,78	EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	98,72%	28,47%	3,47	2,47	EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik	#DIV/0!	7,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	EFISIEN
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	183,35%	17,50%	10,47	9,47	EFISIEN



Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	pembuatan OT dan Kosmetik yang baik					
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	28,76%			
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,54%	91,52%	1,09	0,09	EFISIEN
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	34,65%	0,34%	101,25	100,25	TIDAK EFISIEN
20	Jumlah desa pangan aman	96,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	75,00%	6,37%	11,78	10,78	TIDAK EFISIEN
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88,30%	0,72%	123,27	122,27	TIDAK EFISIEN
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	115,30%	0,72%	160,96	159,96	TIDAK EFISIEN
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154,23%	11,93%	12,93	11,93	TIDAK EFISIEN
25	Indeks RB UPT	-	22,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	
26	Nilai AKIP UPT	-	4,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	0,00%			



Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	24,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	110,85%	1,63%	67,87	66,87	
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	96,67%	34,65%	2,79	1,79	EFISIEN
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	107,38%	12,59%	8,53	7,53	TIDAK EFISIEN
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	21,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	8,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	16,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>TOTAL</b>		<b>98%</b>	<b>33.61%</b>	<b>2.92</b>	<b>1.92</b>	<b>TIDAK EFISIEN</b>

Pada triwulan I tahun 2024, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Tidak Efisien (1,92)**.

Sedangkant hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



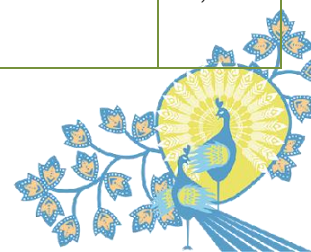
TABEL 3.83  
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI  
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT  
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	<b>3165.AEA.001</b> – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21,43%	420.383.000	3.660.000	0,87%
2	<b>3165.BAH.001</b> Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1969	Keputusan	555	28,19%	1.166.976.000	243.404.500	20,86%
3	<b>3165.BDC.001</b> KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	38517	Orang	37617	97,66%	11.954.590.000	10.913.298.190	91,29%
4	<b>3165.BKB.001</b> Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100,00%	1.000.000.000	130.066.941	13,01%
5	<b>3165.BMB.001</b> Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	45	Layanan	8	17,78%	163.000.000	0	0,00%
6	<b>3165.CAB.002</b> Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	1	100,00%	300.000.000	82.000.000	27,33%
7	<b>3165.CAN.001</b> Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	1	100,00%	245.284.000	226.400.000	92,30%



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
8	<b>3165.PDD.001</b> Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100,00%	2.781.078.000	66.716.449	2,40%
9	<b>3165.QCD.U02</b> Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM di Bandung	10	Perkara	4	40,00%	1.092.120.000	175.146.000	16,04%
10	<b>3165.QDB.001</b> Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	Lembaga	0	0,00%	853.269.000	2.920.000	0,34%
11	<b>3165.QDB.002</b> Desa Pangan Aman	45	Lembaga	0	0,00%	1.223.482.000	0	0,00%
12	<b>3165.QDB.003</b> Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	21	Lembaga	0	0,00%	247.573.000	15.760.000	6,37%
13	<b>3165.QDG.001</b> UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	38	UMKM	0	0,00%	159.963.000	28.000.000	17,50%
14	<b>3165.QIA.001</b> Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	957	Sampel	242	25,29%	778.705.000	57.848.785	7,43%
15	<b>3165.QIA.005</b> Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	2548	Sampel	531	20,84%	2.131.996.000	86.640.562	4,06%
16	<b>3165.QIA.008</b> Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	125	Sampel	120	96,00%	75.515.000	7.512.000	9,95%





No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
17	<b>3165.QIC.001</b> Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	413	Sarana	63	15,25%	920.754.000	199.180.000	21,63%
18	<b>3165.QIC.004</b> Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1451	Sarana	323	22,26%	1.409.535.000	354.964.020	25,18%
19	<b>3165.RAB.001</b> Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0,00%	1.164.821.000	9.723.000	0,83%
20	<b>3165.AEA.001</b> – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21,43%	420.383.000	3.660.000	0,87%
TOTAL						60.149.475.000	20.214.980.571	33,61%

Pada triwulan I tahun 2024, BBPOM di Bandung melaksanakan 20 (dua puluh) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung oleh UPT (TE=1.71). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan I terlaksana secara efisien (TE=1.54).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.





## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

### **4.2 SARAN**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2024 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2024, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada triwulan berikutnya, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **STAKEHOLDERS PERSPECTIVE**

- 🕌 Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 106,79 % dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- 🕌 Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua dan ketiga belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun, sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

### **INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

- 🕌 Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 119,84% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- 🕌 Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 109,78% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung



dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.

- ☰ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 124,02% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 116,68% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

#### **LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE**

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan dan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal serta mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
  - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 102,86% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan berhasilnya Balai Besar POM di Bandung dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
  - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 117,09% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel, namun perlu dilakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan.
3. Pada triwulan I tahun 2024, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (TE = 0,98).

## **4.2 SARAN**

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2024 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan



dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.







# LAMPIRAN

1. REVIU RENCANA STRATEGIS BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2024
3. PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2024
4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG
5. PENGUKURAN KINERJA RAPK TRIWULAN I TAHUN 2024
6. LAPORAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I TAHUN 2024

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung



**BADAN POM**

# REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDUNG



**TAHUN  
2020-2024**





## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
<b>BAB 1</b> PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. RUANG LINGKUP	2
<b>BAB 2</b> HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024	3
A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN	3
B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	14
C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	35
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
<b>BAB 3</b> PENUTUP	53

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>GAMBAR 1</b> Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	3
<b>GAMBAR 2</b> Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	4
<b>GAMBAR 3</b> Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	22
<b>GAMBAR 4</b> Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikalaya Tahun 2020-2024	23



**DAFTAR GRAFIK**

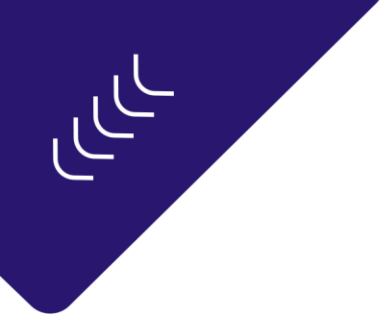
	<b>Halaman</b>
<b>GRAFIK 1</b> Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
<b>GRAFIK 2</b> Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung	6
<b>GRAFIK 3</b> Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung	6
<b>GRAFIK 4</b> Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung	7





## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL 1</b> Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
<b>TABEL 2</b> Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020	8
<b>TABEL 3</b> Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	14
<b>TABEL 4</b> Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	17
<b>TABEL 5</b> Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	24
<b>TABEL 6</b> Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024	26
<b>TABEL 7</b> Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	31
<b>TABEL 8</b> Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	34
<b>TABEL 9</b> Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	36
<b>TABEL 10</b> Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	44
<b>TABEL 11</b> Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024	48



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**REVIU RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**  
**TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana diaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 13 Desember 2021  
Kepala Balai Besar POM di Bandung



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.  
NIP. 19650713 199103 2 001

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta
2. Sekretaris Utama Badan POM RI di Jakarta
3. Inspektur Utama Badan POM RI di Jakarta



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BANDUNG  
NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110  
TAHUN 2021  
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANDUNG  
TAHUN 2020-2024**

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  
TAHUN 2020-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yang dijadikan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya adalah Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung juga perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah:

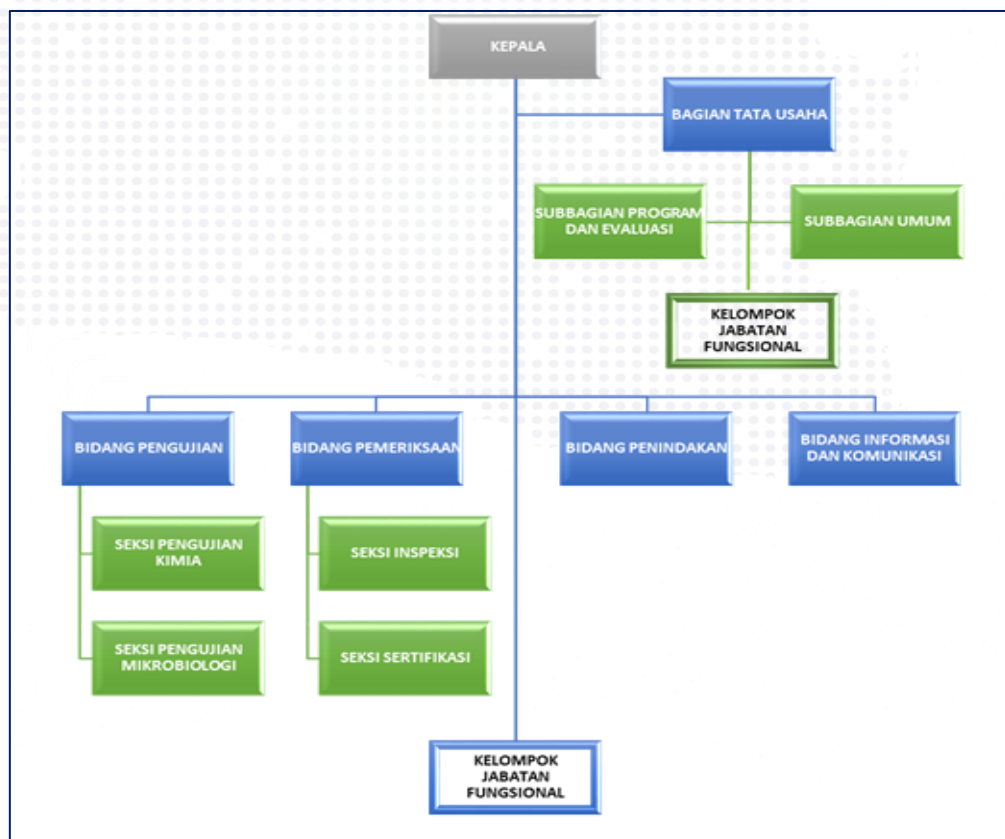
1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target pada level sasaran kegiatan.

## BAB II

### HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024

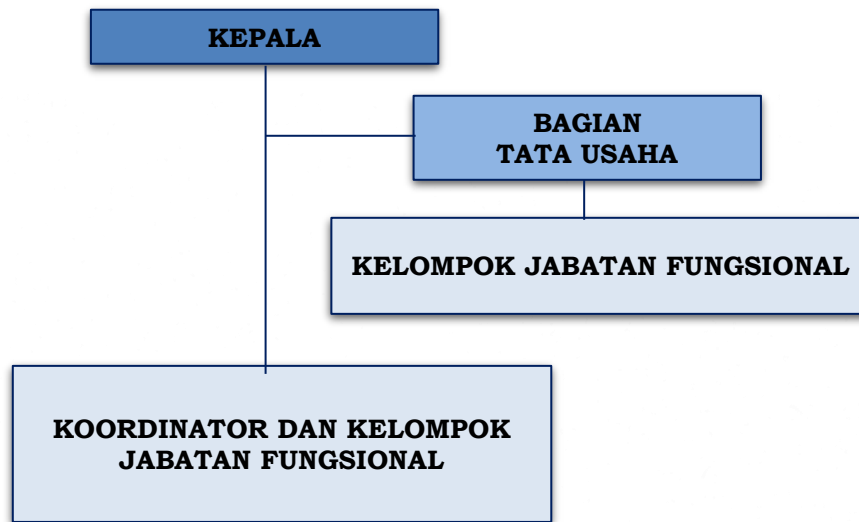
#### A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di Lingkungan BPOM termasuk BBPOM di Bandung. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM**





**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu**  
**Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata**  
**Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM**

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Bandung yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BBPOM di Bandung tahun 2020-2024, telah disusun kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai eksisting sejumlah 129 sedangkan kebutuhan sejumlah 311, sehingga ada gap sejumlah 182 pegawai. Pemetaan kebutuhan pegawai tersebut, selanjutnya dilakukan dalam rentang waktu hingga tahun 2024 dengan memperhitungkan SDM Pensiun dan

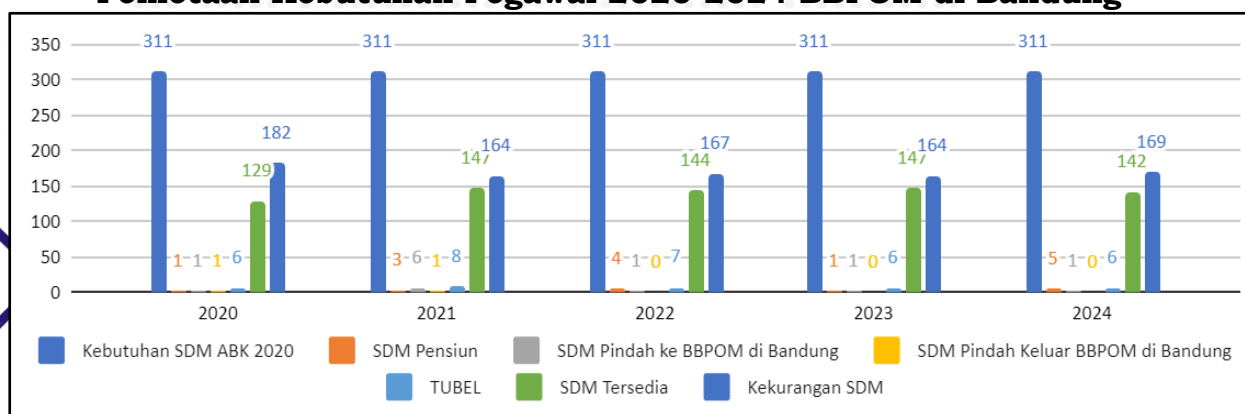


Mutasi masuk dan keluar, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

**Tabel 1**  
**Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan SDM ABK 2020	311	311	311	311	311
SDM Pensiun	1	3	4	1	5
SDM Pindah ke BBPOM di Bandung	1	6	1	1	1
SDM Pindah Keluar BBPOM di Bandung	1	1	0	0	0
SDM yang mengikuti Tugas Belajar	6	8	7	6	6
SDM Tersedia	129	147	144	147	142
<b>Kekurangan SDM</b>	<b>182</b>	<b>164</b>	<b>167</b>	<b>164</b>	<b>169</b>

**Grafik 1**  
**Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung**



Dalam perkembangannya, terdapat perubahan data jumlah SDM secara dinamis, karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Laksana dan Mutasi pegawai, sehingga GAP Pegawai akan selalu disesuaikan. Berdasarkan data SIASN per 21 Februari 2022, jumlah pegawai eksisting adalah 144 pegawai, sehingga GAP kebutuhan pegawai semakin berkurang. Selain itu, berdasarkan data SIASN profil seluruh pegawai eksisting tersebut juga dapat dipetakan dalam gender, tingkat pendidikan dan jabatan sebagai berikut.

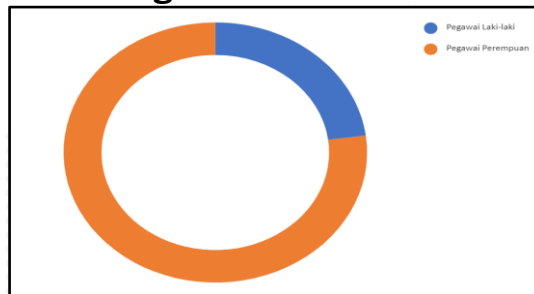




### 1. Profil gender

Proporsi Jumlah pegawai Perempuan (111) lebih banyak dibandingkan pegawai Laki-Laki (33).

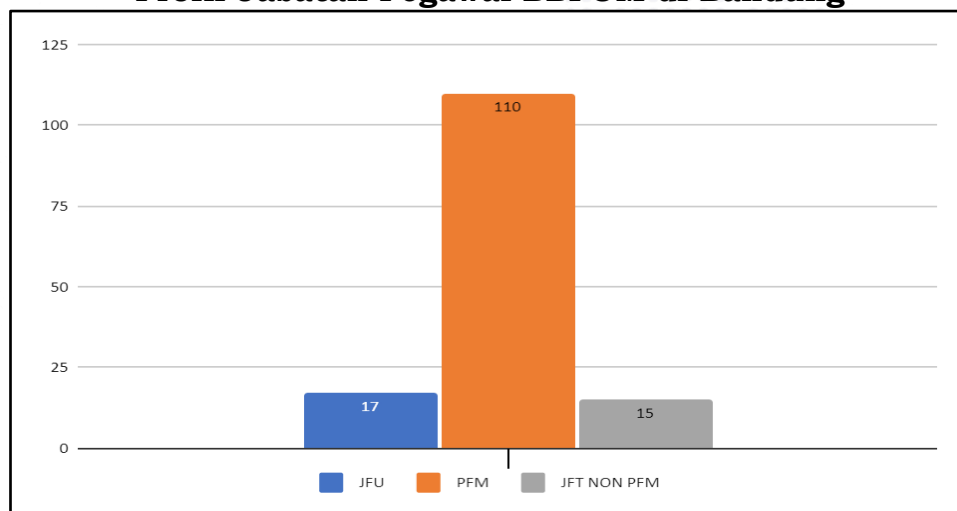
**Grafik 2**  
**Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung**



### 2. Profil Jabatan

Secara umum, profil Jabatan terbanyak adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (110) selanjutnya adalah Pejabat Fungsional Tertentu (15) dan Pejabat Fungsional Umum (17). Untuk Jabatan Struktural, UPT BBPOM di Bandung terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha.

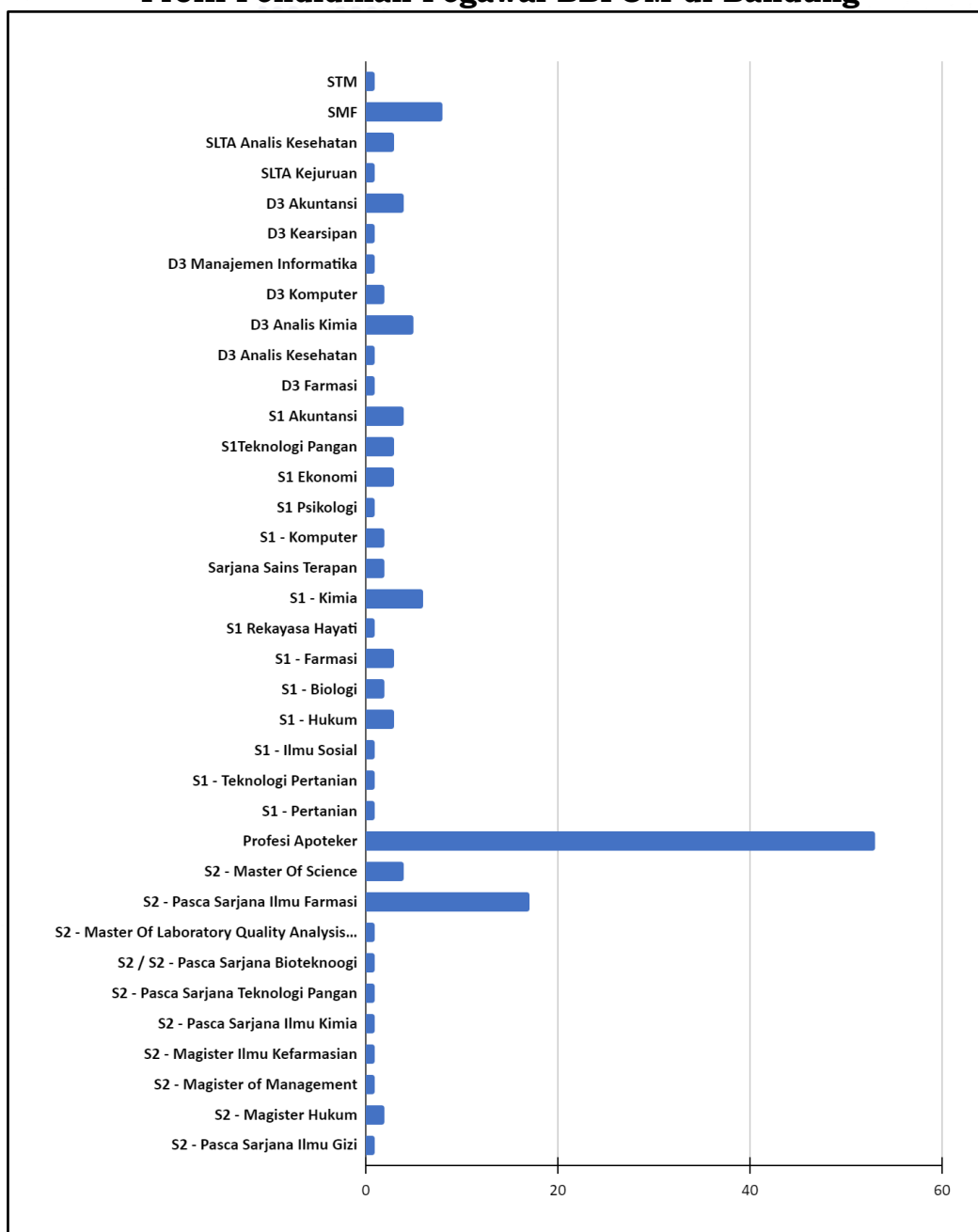
**Grafik 3**  
**Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung**



### 3. Profil Pendidikan

Secara umum, Pendidikan tertinggi Pegawai adalah Strata 2 (S-2) dan Profesi Apoteker dan terendah adalah setingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Farmasi. Untuk jumlah pegawai terbanyak adalah Pegawai dengan Pendidikan Profesi Apoteker sejumlah 53 pegawai, seperti dapat dilihat dalam grafik berikut.

**Grafik 4**  
**Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung**



3. Capaian Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020  
Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80%	97,62%	120,82%	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	76,80%	98,46%	98,46%	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	104,99%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	93,40%	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>104,42%</b>	<b>104,21%</b>	<b>BAIK</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00%	67,35%	93,54%	93,54%	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>93,54%</b>	<b>93,54%</b>	<b>BAIK</b>
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	90,82	109,42%	109,42%	Baik
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	106,24%	Baik
		8. Indeks kepuasan	88,5	85,91	97,07%	97,07%	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung					
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>104,24%</b>	<b>104,24%</b>	<b>BAIK</b>
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	111,32%	Sangat Baik
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	91,20%	Baik
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	101,78%	Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	113,18%	Sangat Baik
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	96,96%	Baik
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	113,51%	Sangat Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>104,66%</b>	<b>104,66%</b>	<b>BAIK</b>
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43	90,70	104	104	Baik
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	100	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	6	6	100	100	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	100	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>101</b>	<b>101</b>	<b>BAIK</b>
6.	Meningkatnya efektivitas	19. Persentase sampel Obat yang	82	89,75	109	109	Baik



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	diperiksa dan diuji sesuai standar					
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	88,60	108	108	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>109</b>	<b>109</b>	<b>BAIK</b>
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	62,33	84	84	Cukup
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>CUKUP</b>
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	80,15	88	88	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	80,54	99	99	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>BAIK</b>
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78,58	105	105	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>105</b>	<b>105</b>	<b>BAIK</b>
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	71,50	94	94	Baik
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	132	120	Tidak dapat disimpulkan
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>113</b>	<b>107</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	102,30%	Baik
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	108,70%	Baik
		<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN</b>			<b>105,05%</b>	<b>105,05%</b>	<b>BAIK</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk





pada tabel 2, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Bandung selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Bandung dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Bandung juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratory (BSL) 2* yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

#### 4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung 2020-2024, Balai Besar POM di Bandung telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Bandung dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra

BBPOM di Bandung tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

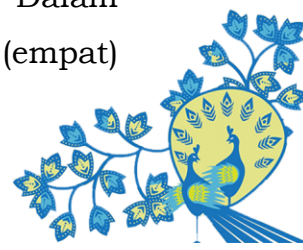
- 1) Peran BBPOM di Bandung sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BBPOM di Bandung dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Bandung masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid*.
  - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Bandung dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Bandung mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:



- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**  
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*).
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Bandung; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam



rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Bandung dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

**B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024**, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024**

<b>Visi</b>	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong
-------------	--



<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> <li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</li> <li>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.</li> <li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat</li> </ol>



	<p>dan Makanan.</p> <p>6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p> <p>7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>
--	--

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024, karena ada perubahan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi BPOM Tahun 2020-2024. Perubahannya adalah penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM sebagai berikut:



Tabel 4

## Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Indeks Pelayanan Publik 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar		
		3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.	1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit. 2. Penguatan pengujian analisi/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM yang optimal		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.	Persentase UMKM yang memenuhi standar.		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat. 2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 3. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan.	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh UPT

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			memenuhi syarat		
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Bandung 2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		

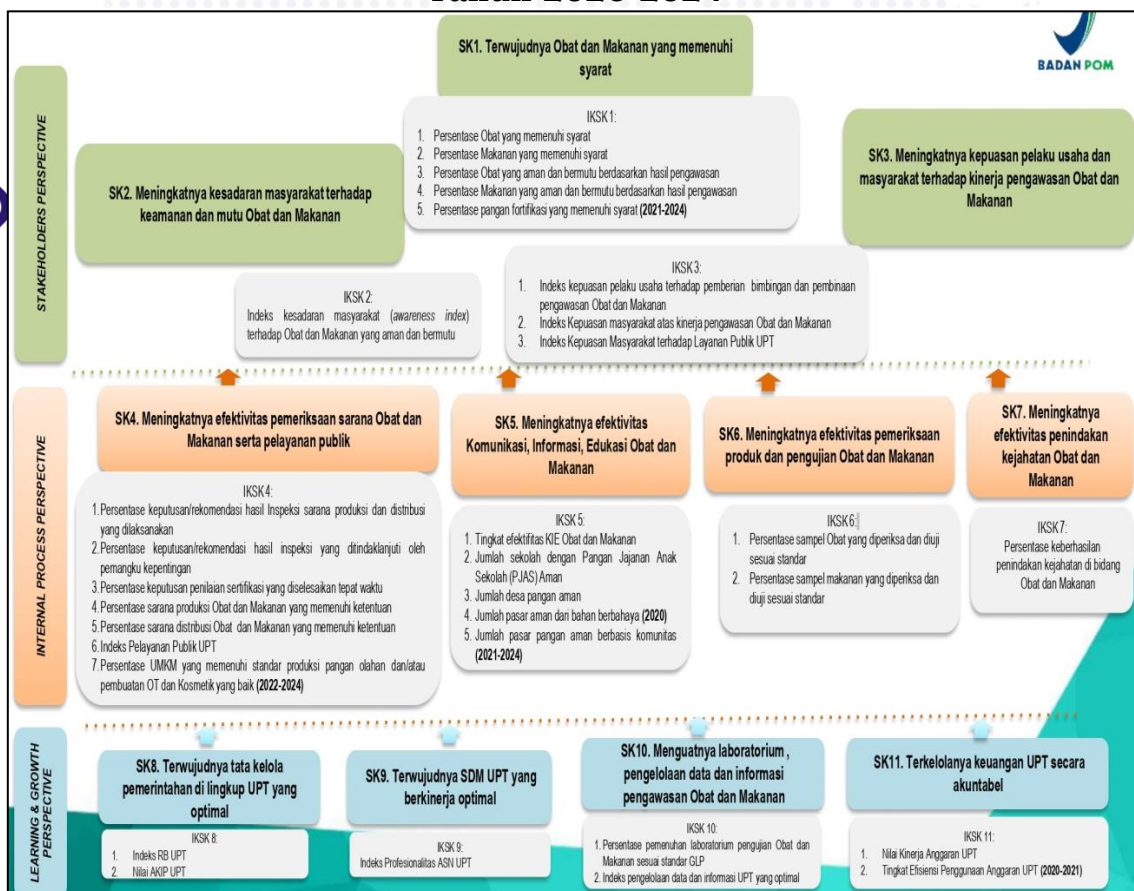


MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		

### 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Bandung

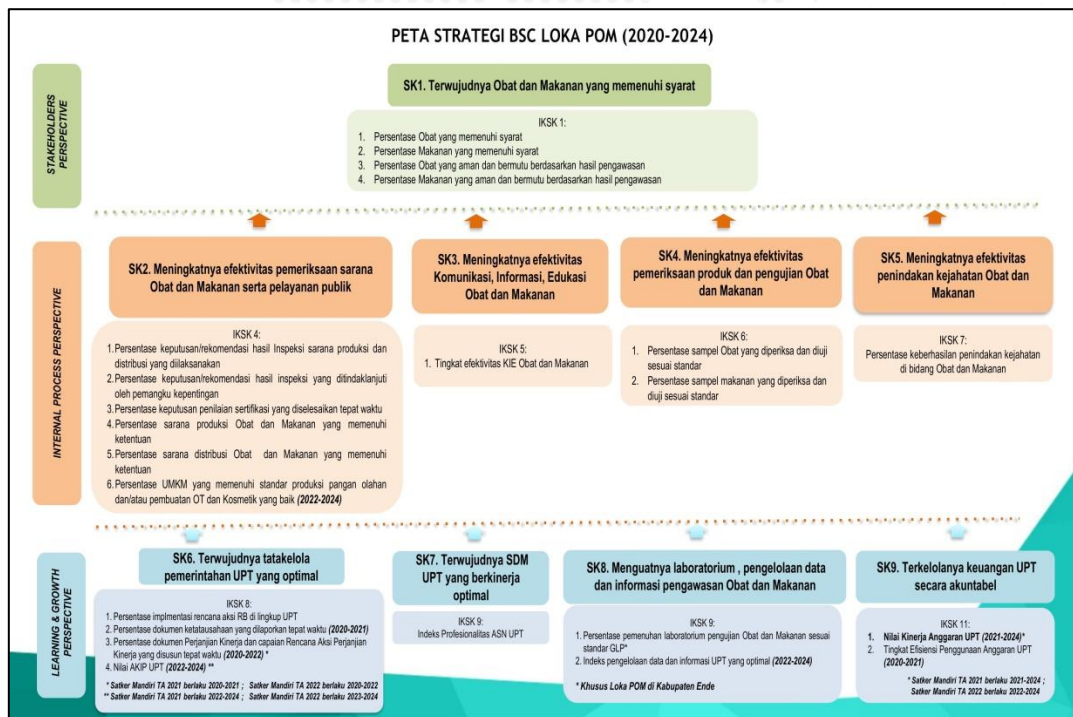
Tidak ada perubahan sasaran kegiatan pada peta strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, namun demikian dilakukan penambahan, pengurangan serta perubahan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Bandung yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Reviu terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Bandung sebagai berikut:

**Gambar 3**  
**Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung**  
**Tahun 2020-2024**



4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM
- Peta Strategis Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 hanya berlaku pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022, Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya telah menjadi Satker Mandiri sehingga bukan lagi bagian dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024.

**Gambar 4**  
**Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan**  
**Loka POM di Tasikalaya**  
**Tahun 2020-2024**



## C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 1. Arah Kebijakan BBPOM di Bandung

Adanya perubahan arah kebijakan BPOM karena perubahan lingkungan strategis terkini, maka Arah Kebijakan BBPOM di Bandung berubah mengacu pada perubahan Arah Kebijakan

BPOM. Beberapa perubahan Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Bandung harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigmatindakan penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024**

<b>Arah Kebijakan (Semula)</b>	<b>Arah Kebijakan (Menjadi)</b>
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan



Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
	kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan <b>lembaga riset</b> dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan <b>dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.</b>
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.





## 2. Strategi BBPOM di Bandung

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Bandung sesuai Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Bandung mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024**

<b>Strategi (Semula)</b>	<b>Strategi (Menjadi)</b>
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan	3. Intensifikasi pembinaan dan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Bandung, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Bandung dalam

menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

#### **D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

##### **1. Target Kinerja**

Kinerja BBPOM di Bandung yang digambarkan dalam Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, tidak terdapat perubahan pada sasaran kegiatan, namun terdapat perubahan pada indikator kinerja yaitu : penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru : (1) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase UMKM yang memenuhi standar, dan pengurangan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Sehingga jumlah indikator kinerja BBPOM di Bandung sebelumnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Secara umum target tetap dan meningkat. Namun terdapat target indikator yang turun antara lain:

- a. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**, penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: sampel makanan yang disampling secara purposive/targeted, yang tidak memenuhi syarat masih tinggi, sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium.
- b. **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**, penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab

rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) rendahnya indeks pengetahuan dan indeks perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat; (2) Persepsi masyarakat terhadap obat dan makanan masih dianggap seperti komoditi biasa pada umumnya yang tidak memerlukan perhatian lebih; (3) masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan.

- c. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**, penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) selama wabah/pandemi penyakit, pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tidak bisa optimal dibandingkan tahun sebelumnya; dan (2) Siklus pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian ke setiap sarana relative lama sehingga kesadaran akan pemenuhan ketentuan relative rendah.
- d. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: belum terselesaikannya perkara *carry over* tahun sebelumnya hingga ke penyerahan tahap II karena adanya pandemik Covid-19.
- e. **Indeks RB BBPOM di Bandung**, penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB.



Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:





**Tabel 7**  
**Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97,62	97	97.5	98	98.5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	76,80	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	94,49	95	95.5	96	96,5
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	67,25	70	72	74	76
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat							70	72	74	76
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	90,82	71	74	77	80
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	75,43	91.1	92.3	93.4	94.6
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	85,91	77.83	80.22	82.62	85.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		89,50	90,50	91,00	92,00
Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/	87	89	91	93	95	96,85	96	97	98	99

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan										
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	56,9	63,9	70,9	78	85	51,89	64	71	78	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	86,51	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	56,59	57	61	66	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	73,69	74	76	78	80
	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,2	4,35	4,45	4,51	4,55
	Persentase UMKM yang memenuhi standar							-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	90,70	92	93.8	95.7	97.6
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	16	42	76	112	150
	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	6	19	28	37	47
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	2	8	13	18	23
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai	82	85	88	91	94	89,75	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	standar										
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	88,60	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	62,33	65	67	69	71
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8
	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	80,54	83	85.5	88	90.5
Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	78,58	79	80	81	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	71,50	79	84	89	94
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2	2.25	2.5	3
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-

## 2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

**Tabel 8**

### **Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung**

No.	Program/Kegiatan (Semula)	Program/Kegiatan (Menjadi)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tetap
2	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Tetap
3		Program Dukungan Manajemen
4		Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

## 3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Bandung secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga

deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Bandung 2020-2024.

#### **E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:





**Tabel 9**  
**Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung**  
**Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024**

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksanaan	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung								Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung									BBPOM di Bandung	
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,62	97	97.5	98	98.5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76,80	80	82	84	86	Pro PN		BBPOM di Bandung
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,49	95	95.5	96	96,5	-		BBPOM di Bandung
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,25	70	72	74	76	-		BBPOM di Bandung
									5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		70	72	74	76	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama),	BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
																	dipindahkan ke UPT disesuaikan denganUnit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83		1.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67,35	71	74	77	80	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	83	85	86	87,5	89		1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	90,82	91.1	92.3	93.4	94.6	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024			
	dan Makanan							pengawasan Obat dan Makanan								
	2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,43	77.83	80.22	82.62	85.01	-		BBPOM di Bandung
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	85,91	89,50	90,50	91,00	92,00	-		BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung								
	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,85	96	97	98	99	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	56,9	63,9	70,9	78	85		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	51,89	64	71	78	85	-		BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024			
	dilaksanakan							dilaksanakan								
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,51	88	91	94	97	-	Tidak dilakukan penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56,59	57	61	66	70	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,69	74	76	78	80	Pro PN		BBPOM di Bandung
	6. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51		6. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,2	4,35	4,45	4,51	4,55	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
								7. Persentase UMKM yang memenuhi standar		-	77	79	81	Pro PN	Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam	BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024
																indikator tersendiri		
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020		
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,70	92	93.8	95.7	97.6		-	BBPOM di Bandung
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	42	76	112	150		Pro PN	BBPOM di Bandung
	3.	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47		3.	Jumlah desa pangan aman	6	19	28	37	47		Pro PN	BBPOM di Bandung
	4.	Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	4	8	13	18	23		4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	8	13	18	23		Pro PN	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,75	100	100	100	100	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa	82	84	86	88	90		2.	Persentase sampel makanan yang	88,60	100	100	100	100	Pro PN		BBPOM di Bandung



SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024			
	dan diuji sesuai standar							diperiksa dan diuji sesuai standar								
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90		1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62,33	65	67	69	71	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								
	1. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95		1. Indeks RB BBPOM di Bandung	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8	-	Penurunan target Disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan	BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024			
															penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	
	2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92		2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	80,54	83	85.5	88	90.5	-	Dilakukan penyesuaian kembali Target terhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal							Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal								
	1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85		1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	78,58	79	80	81	82	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan							Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90		1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71,50	79	84	89	94	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2	2	2.25	2.5	3	-		BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024
	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
	1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97		1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9	-	Dilakukan penyesuaian kembali targetterhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-	-	Mulai tahun 2022- 2024 target indikator ini dihapus karena sudah terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran	BBPOM di Bandung

Tabel 10

**Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor  
Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024**

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,72	97	97,5	98	98,5	
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,59	85	87	89	91	
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,44	94	95	95,5	96	
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80	82	83	85	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,83	96	97	99	10	
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,67	60	65	70	75	
	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	46,49	88	90	92	94	

SEMULA							MENJADI								Pro PN	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*		2024*
		diselesaikan tepat waktu								diselesaikan tepat waktu						
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,44	67	71	75	79	
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,90	75	77	79	80	
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,11	90.0	90.9	91.8	92.7	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43,00	70	74	78	82	



SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal							
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	136,36	100	100	100	100	
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor	-	78.9	80.6	82.2	83.9	
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor							
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor	-	-	2,25	2,5	3	
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal							
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,00	85,2	85,4	85,6	85,8	
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel							
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	100,00	Efisien (92%)	-	-	-	

**Keterangan:**

\* Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung.

Tabel 11

**Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya  
Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024**

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,36	97	97,5	98	98,5	
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,71	85,5	87	88,5	90	
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,30	96	96,5	97	97,5	
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62,50	62,5	65	68	70	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,64	90	92	93	95	
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	33,75	50	55	60	65	
	3.	Persentase keputusan	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan	60,00	88	90	93	95	

SEMULA							MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu								penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu						
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,29	61	66	70	75	
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84,41	84	86	88	90	
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,88	89.5	91.3	93.1	95.0	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	100,00	70	74	78	82	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		bidang Obat dan Makanan								bidang Obat dan Makanan						
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal							
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	100,00	100	100	100	100	
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	97,73	100	-	-	-	
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	78.9	80.6	82.2	83.9	
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya							
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	2,25	2,5	3	
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal							
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75,94	77	78	79	80	
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel							
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	Efisien (88%)	Efisien (89%)	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	100,00	Efisien (92%)	-	-	-	



SEMULA							MENJADI								Pro PN	
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*		2024*
		Tasikmalaya								Tasikmalaya						

**Keterangan:**

\*Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung

## **F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

- a. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Bandung.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Bandung yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

### **2. Rekomendasi**

- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Bandung serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung.
- b. BBPOM di Bandung selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **BAB III PENUTUP**

Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Bandung tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Bandung sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Bandung agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung. BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Bandung dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Bandung ini, diharapkan BBPOM di Bandung terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.  
NIP. 19650713 199103 2 001



**BADAN POM**

📍 Jalan Pasteur Nomor 25, Bandung

🌐 [bandung.pom.go.id](http://bandung.pom.go.id)    📘 BPOMBandung

📷 @bpombandung    🐦 @BPOMBandung

📺 BalaiBesarPOMdiBandung

 **KABAYAN**  
Ka Balai Melayani  
**08112440533**

 **Si Heung**  
0821 2893 6046

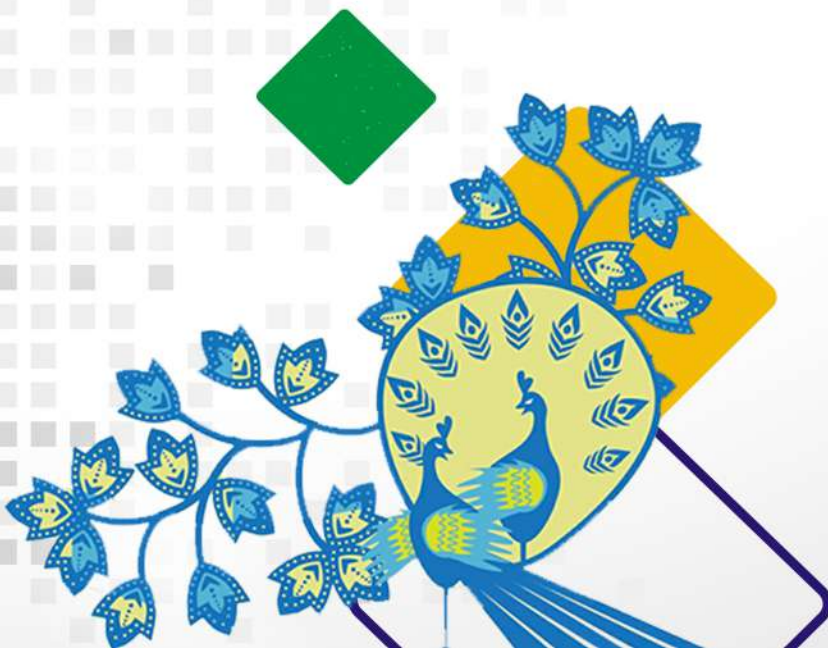
 **1500533**  
HALOB POM



**BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDUNG *WBK*  
MENJUJI *WBBM!***



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

**NOMOR HK.02.02.12A.12A5.07.23.414 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BADNUNG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 15 Juli 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

## PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.12A.12A5.07.23.414 TAHUN  
2023

## TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2024RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BANDUNG  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik	4,55
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah desa pangan aman	47
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,8
		Nilai AKIP UPT	90,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	94
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,9

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI BESAR POM DI BANDUNG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm, MARS.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm, MARS.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.5 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.8 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.9 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.78 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81 %
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.45
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.6
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138 sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	45 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21 Pasar

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.04 %
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86.7
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.5
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85.01
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.75
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	92.47
		03 - Nilai AKIP UPT	84
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.64
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.32
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.01
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.28
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 65.003.803.000 (Enam Puluh Lima Miliar Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah)



NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32.440.638.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	32.563.165.000

Bandung, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di Bandung



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm, MARS.



[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	11.661.330.000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	10	20	30	35	35	40	50	60	70	85	138	934.719.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	10	15	20	40	45	60	75	80	90	95	45	1.316.302.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	25	40	50	60	70	80	85	90	21	247.573.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	378.759.000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	374.839.000
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	15	22	28	32	38	44	49	56	62	66	80	1.644.243.000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.04	4.348.448.900
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	693.755.600
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.7	121.355.500
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.5	353.322.000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.01	257.519.500
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.75	989.130.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Layanan Publik UPT													
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.47	4.596.180.000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	208.558.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.64	15.360.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.32	27.682.539.000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	35	45	55	60	65	70	75	80	85	87	91.01	264.832.000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.28	438.206.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	553.626.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	415.810.500
														<b>Total</b>	65.003.803.000

Bandung, 22 December 2023

Kepala Balai Besar POM di Bandung

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Capaian RAPK BBPOM di Bandung  
Triwulan I 2024

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Targ et Januari	Realisasi s.d					Targe t Februari	Realisasi s.d					Targ et Maret	Realisasi s.d				
						Januari						Februari						Maret				
						Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Janua ri	%Capai an thd Target 2024		Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Febru ari	%Capai an thd Target 2024		Pembila ng	Penye but	Realisa si	%Capa ian thd Target Maret	%Capai an thd Target 2024
1	Terwujud nya Obat dan Makanan yang memenuh i syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.50	98.50	10	10	100.00	101.52	101.52	98.50	58	60	96.67	98.14	98.14	98.5	230	237	97.05	98.52	98.52
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.80	88.80	0	0	0.00	0.00	0.00	88.80	52	75	69.33	78.08	78.08	88.8	71	94	75.53	85.06	85.06
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	96.50	0	1	0.00	0.00	0.00	96.50	40	42	95.24	98.69	98.69	96.5	95	100	95.00	98.45	98.45
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.90	82.90	0	0	0.00	0.00	0.00	82.90	22	23	95.65	115.38	115.38	82.9	31	40	77.50	93.49	93.49
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	90.00	0	0	0.00	0.00	0.00	90.00	0	0	0.00	0.00	0.00	90	60	60	100.00	111.11	111.11
2	Meningka tnya kesadara n masyarakat terhadap keamana n dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	86.70	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	



No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Targ et Januari	Realisasi s.d					Targe t Februari	Realisasi s.d					Targ et Maret	Realisasi s.d				
						Januari						Februari						Maret				
						Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Janua ri	%Capai an thd Target 2024		Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Febru ari	%Capai an thd Target 2024		Pembila ng	Penye but	Realisa si	%Capa ian thd Target Maret	%Capai an thd Target 2024
	di masing-masing wilayah kerja UPT																					
3	Meningka tnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarak at terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing -masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.50	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n		
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85.01	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n		
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.75	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n		
4	Meningka tnya efektivitas pemeriks aan sarana obat dan makanan serta pelayana n publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekom endasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.00	99.00	-	-	66.67	67.34	67.34	99.00	-	-	89.20	90.10	90.10	99	-	-	98.31	99.30	99.30
		11	Persentase keputusan/rekom endasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90.00	90.00	-	-	104.00	115.56	115.56	90.00	-	-	70.63	78.47	78.47	90	-	-	96.33	107.04	107.04
		12	Persentase keputusan penilaian	99.78	99.78	-	-	98.47	98.69	98.69	99.78	-	-	99.53	99.75	99.75	99.78	-	-	99.7	99.92	99.92



No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Targ et Janu ari	Realisasi s.d					Targe t Febru ari	Realisasi s.d					Targ et Mare t	Realisasi s.d				
						Januari						Februari						Maret				
						Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Janua ri	%Capai an thd Target 2024		Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Febru ari	%Capai an thd Target 2024		Pembila ng	Penye but	Realisa si	%Capa ian thd Target Maret	%Capai an thd Target 2024
			sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu																			
13			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	70.00	18	29	62.07	88.67	88.67	70.00	38	63	60.32	86.17	86.17	70	61	102	59.80	85.43	85.43
14			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81.00	81.00	132	153	86.27	106.51	106.51	81.00	259	323	80.19	98.99	98.99	81	363	454	79.96	98.71	98.71
15			Indeks Pelayanan Publik	4.45	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	-
16			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100.00	10.00	-	-	6.67	66.67	6.67	15.00	-	-	10.00	66.67	10.00	20.00	-	-	36.67	183.33	36.67
17			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupat en/Kota	95.00	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahu n	-					Dihit ung pada Akhir Tahu n

N o	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Targ et Janu ari	Realisasi s.d					Targe t Febru ari	Realisasi s.d					Targ et Mare t	Realisasi s.d				
						Januari						Februari						Maret				
						Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Janua ri	%Capai an thd Target 2024		Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Febru ari	%Capai an thd Target 2024		Pembila ng	Penye but	Realisa si	%Capa ian thd Target Maret	%Capai an thd Target 2024
5	Meningka tnya efektivitas komunika si. informasi. edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	1 8	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.6 0	96. 60	-	-	96.55	99.95	99.95	96.6 0	-	-	95.26	98.61	98.61	96. 60	-	-	96.1 6	99.54	99.54
		1 9	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138. 00	0.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	10.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	20	-	-	6.93	34.65	6.93
		2 0	Jumlah desa pangan aman	45.0 0	0.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	10.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	15	-	-	14.5 0	96.67	14.50
		2 1	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	21.0 0	0.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	10.0 0	-	-	0.00	0.00	0.00	20	-	-	15.0 0	75.00	15.00
6	Meningka tnya efektivitas pemeriks aan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	2 2	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100. 00	5.0 0	-	-	1.35	27.08	1.35	10.0 0	-	-	8.79	87.9	8.79	20	-	-	17.6 6	88.30	17.66
		2 3	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100. 00	5.0 0	-	-	3.47	69.32	3.47	10.0 0	-	-	13.57	135.67	13.57	20	-	-	23.0 6	115.2 8	23.06
7	Meningka tnya efektivitas penindak an kejahatan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	2 4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.0 0	5.0 0	-	-	25.47	509.32	31.83	15.0 0	-	-	33.53	223.53	41.91	22	-	-	33.9 3	154.2 2	42.41

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Target Januari	Realisasi s.d					Target Februari	Realisasi s.d					Target Maret	Realisasi s.d					
						Januari						Februari						Maret					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2024		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2024		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2024	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	92.47	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	
		26	Nilai AKIP UPT	84.00	-	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.64	-	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.32	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	
10	Memperkuatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.04	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihitung pada Akhir Tahun	-	-	-	87.94	110.85	99.89	
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	-	-	2	66.67	66.67	3.00	-	-	2.1	70.00	70.00	3.00	-	-	2.9	96.67	96.67	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.01	25.00	-	-	-	-	Nilai EKA belum keluar	35.00	-	-	-	-	Nilai EKA belum keluar	45.00	-	-	-	-	Nilai EKA belum keluar	



No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Targ et Januari	Realisasi s.d					Targe t Februari	Realisasi s.d					Targ et Maret	Realisasi s.d				
						Januari						Februari						Maret				
						Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Januari	%Capai an thd Target 2024		Pembil ang	Penye but	Realis asi	%Cap aian thd Target Februari	%Capai an thd Target 2024		Pembila ng	Penye but	Realisa si	%Capa ian thd Target Maret	%Capai an thd Target 2024
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.28	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84.00	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60.00	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	-	-	-	-	Dihit ung pada Akhir Tahun	

Bandung, 16 April 2024  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung



Drs. I Made Bagus Gerametta. Apt. *1*

## BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat Kantor Balai Besar POM di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt  
NIP : 19690718 199603 1 001  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

2. Nama : Dwi Kurniasari, S.Si., Apt  
NIP : 19810108 200604 2 004  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Bandung

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung periode Januari sampai dengan bulan Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan I

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2024	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21,43%	420.383.000	3.660.000	0,87%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1969	Keputusan	555	28,19%	1.166.976.000	243.404.500	20,86%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	38517	Orang	37617	97,66%	11.954.590.000	10.913.298.190	91,29%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100,00%	1.000.000.000	130.066.941	13,01%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	45	Layanan	8	17,78%	163.000.000	0	0,00%
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	1	100,00%	300.000.000	82.000.000	27,33%
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	1	100,00%	245.284.000	226.400.000	92,30%
8	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	1	Laboratorium	1	100,00%	2.781.078.000	66.716.449	2,40%



No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2024	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Good Laboratory Practice							
9	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	10	Perkara	4	40,00%	1.092.120.000	175.146.000	16,04%
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	Lembaga	0	0,00%	853.269.000	2.920.000	0,34%
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	45	Lembaga	0	0,00%	1.223.482.000	0	0,00%
12	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	21	Lembaga	0	0,00%	247.573.000	15.760.000	6,37%
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	38	UMKM	0	0,00%	159.963.000	28.000.000	17,50%
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	957	Sampel	242	25,29%	778.705.000	57.848.785	7,43%
15	3165.QIA.005 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	2548	Sampel	531	20,84%	2.131.996.000	86.640.562	4,06%
16	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	125	Sampel	120	96,00%	75.515.000	7.512.000	9,95%
17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	413	Sarana	63	15,25%	920.754.000	199.180.000	21,63%
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1451	Sarana	323	22,26%	1.409.535.000	354.964.020	25,18%
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0,00%	1.164.821.000	9.723.000	0,83%
20	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100,00%	32.060.431.000	7.611.740.124	23,74%
	<b>TOTAL</b>					60.149.475.000	20.214.980.571	33,61%

## 2. Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	$g=(f/e \times 100)$	h	i	$j=(h/i \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	97,05	98,53 %	1.410.937.360	57.182.771	4,05%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,8	75,53	85,06 %	513.163.150	37.601.710	7,33%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	95	98,45 %	724.878.640	29.457.791	4,06%
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,9	77,5	93,49 %	265.541.850	20.247.075	7,62%
		5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11 %	75.515.000	7.512.000	9,95%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	114.100.000	0	0,00%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,5	97,93	100,44 %	142.776.000	0	0,00%
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	254.410.000	13.492.500	5,30%
		9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	-	-	-	989.130.000	7.948.044	0,80%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	98,31	99,30 %	154.514.000	13.450.000	8,70%
		11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	96,33	107,03 %	4.820.000	0	0,00%
		12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,78	99,7	99,92 %	1.111.610.000	267.663.189	24,08%
		13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	59,8	85,43 %	878.610.000	198.610.000	22,61%
		14 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	81	79,96	98,72 %	1.176.015.000	334.804.020	28,47%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	$g=(f/e \times 100)$	h	i	$j=(h/i \times 100)$
		15 Indeks Pelayanan Publik			#DIV/0!	430.080.000	33.972.426	7,90%
		16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	36,67	183,35 %	159.963.000	28.000.000	17,50%
		17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	307.340.000	88.383.941	28,76%
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	18 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,16	99,54 %	11.939.733.000	10.927.425.190	91,52%
		19 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	6,93	34,65 %	853.269.000	2.920.000	0,34%
		20 Jumlah desa pangan aman	15	14,5	96,67 %	1.223.482.000	0	0,00%
		21 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20	15	75,00 %	247.573.000	15.760.000	6,37%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	17,66	88,30 %	374.839.000	2.685.000	0,72%
		23 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	23,06	115,30 %	374.839.000	2.685.000	0,72%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	24 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22	33,93	154,23 %	1.498.983.000	178.806.000	11,93%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Indeks RB UPT	-	-	-	4.359.406.000	971.430.120	22,28%
		26 Nilai AKIP UPT	-	-	-	216.204.000	9.823.250	4,54%
		27 Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	95.360.000	0	0,00%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28 Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	26.380.562.000	6.496.243.464	24,63%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,33	87,94	110,85 %	1.822.498.900	29.767.916	1,63%
		30 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	2,9	96,67 %	693.755.600	240.420.794	34,65%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	$g=(f/e \times 100)$	h	i	$j=(h/i \times 100)$
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31 Nilai Kinerja Anggaran UPT	45	48.32	107,38 %	210.436.000	26.500.000	12,59%
		32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	455.803.000	99.760.529	21,89%
		33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	548.317.000	48.815.541	8,90%
		34 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	141.010.500	23.612.300	16,75%
	TOTAL					60.149.475.000	20.214.980.571	33,61%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung



Drs. Made Bagus Gerametta, Apt.

Bandung, 24 April 2024  
Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt,



Realisasi anggaran dan capaian output dibandingkan target dan nilai efisiensi sampai dengan Triwulan I 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	KET
a	b	c		d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)	i = (e/h)	j = i-1	
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21,43%	420.383.000	3.660.000	0,87%	24,61	23,61	Tidak Efisien
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1969	Keputusan	555	28,19%	1.166.976.000	243.404.500	20,86%	1,35	0,35	Efisen
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	38517	Orang	37617	97,66%	11.954.590.000	10.913.298.190	91,29%	1,07	0,07	Efisen
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	1	100,00%	1.000.000.000	130.066.941	13,01%	7,69	6,69	Tidak Efisien
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	45	Layanan	8	17,78%	163.000.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	1	100,00%	300.000.000	82.000.000	27,33%	3,66	2,66	Tidak Efisien
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	Unit	1	100,00%	245.284.000	226.400.000	92,30%	1,08	0,08	Efisen
8	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	1	100,00%	2.781.078.000	66.716.449	2,40%	41,69	40,69	Tidak Efisien
9	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	10	Perkara	4	40,00%	1.092.120.000	175.146.000	16,04%	2,49	1,49	Efisen
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	Lembaga	0	0,00%	853.269.000	2.920.000	0,34%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	45	Lembaga	0	0,00%	1.223.482.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
12	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	21	Lembaga	0	0,00%	247.573.000	15.760.000	6,37%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	38	UMKM	0	0,00%	159.963.000	28.000.000	17,50%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	957	Sampel	242	25,29%	778.705.000	57.848.785	7,43%	3,40	2,40	Tidak Efisien
15	3165.QIA.005 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	2548	Sampel	531	20,84%	2.131.996.000	86.640.562	4,06%	5,13	4,13	Tidak Efisien
16	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	125	Sampel	120	96,00%	75.515.000	7.512.000	9,95%	9,65	8,65	Tidak Efisien



17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	413	Sarana	63	15,25%	920.754.000	199.180.000	21,63%	0,71	-0,29	Tidak Efisien
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1451	Sarana	323	22,26%	1.409.535.000	354.964.020	25,18%	0,88	-0,12	Tidak Efisien
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0,00%	1.164.821.000	9.723.000	0,83%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
20	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100,00%	32.060.431.000	7.611.740.124	23,74%	4,21	3,21	Tidak Efisien
Total		46297		39471	85,26	60.149.475.000	20.214.980.571	33,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE
		Target 2024	Target TW I	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	98,5	97,05	98,53%	1.410.937.360	57.182.771	4,05%	23,31	TIDAK EFISIEN
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,8	88,8	75,53	85,06%	513.163.150	37.601.710	7,33%	10,61	TIDAK EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5	95	98,45%	724.878.640	29.457.791	4,06%	23,22	TIDAK EFISIEN
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,9	82,9	77,5	93,49%	265.541.850	20.247.075	7,62%	11,26	TIDAK EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	100	111,11%	75.515.000	7.512.000	9,95%	10,17	TIDAK EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,7			#DIV/0!	114.100.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,5	97,5	97,93	100,44%	142.776.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,01			#DIV/0!	254.410.000	13.492.500	5,30%	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,75			#DIV/0!	989.130.000	7.948.044	0,80%	#DIV/0!	#DIV/0!

10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	99	98,31	99,30%	154.514.000	13.450.000	8,70%	11,41	10,41	TIDAK EFISIEN
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	90	96,33	107,03%	4.820.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (50%)	99,78	99,78	99,7	99,92%	1.111.610.000	267.663.189	24,08%	4,15	3,15	TIDAK EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	59,8	85,43%	878.610.000	198.610.000	22,61%	3,78	2,78	TIDAK EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	81	81	79,96	98,72%	1.176.015.000	334.804.020	28,47%	3,47	2,47	TIDAK EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,45			#DIV/0!	430.080.000	33.972.426	7,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	20	36,67	183,35%	159.963.000	28.000.000	17,50%	10,47	9,47	TIDAK EFISIEN
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95			#DIV/0!	307.340.000	88.383.941	28,76%			-
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	96,6	96,16	99,54%	11.939.733.000	10.927.425.190	91,52%	1,09	0,09	EFISIEN
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	20	6,93	34,65%	853.269.000	2.920.000	0,34%	101,25	100,25	TIDAK EFISIEN
20	Jumlah desa pangan aman	45	15	14,5	96,67%	1.223.482.000	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21	20	15	75,00%	247.573.000	15.760.000	6,37%	11,78	10,78	TIDAK EFISIEN



22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	17,66	88,30%	374.839.000	2.685.000	0,72%	123,27	122,27	TIDAK EFISIEN
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	23,06	115,30%	374.839.000	2.685.000	0,72%	160,96	159,96	TIDAK EFISIEN
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	22	33,93	154,23%	1.498.983.000	178.806.000	11,93%	12,93	11,93	TIDAK EFISIEN
25	Indeks RB BBPOM di Bandung	92,47			#DIV/0!	4.359.406.000	971.430.120	22,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	84			#DIV/0!	216.204.000	9.823.250	4,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,64			#DIV/0!	95.360.000	0	0,00%			EFISIEN
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM	91,32			#DIV/0!	26.380.562.000	6.496.243.464	24,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,04	79,33	87,94	110,85%	1.822.498.900	29.767.916	1,63%	67,87	66,87	TIDAK EFISIEN
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	3	2,9	96,67%	693.755.600	240.420.794	34,65%	2,79	1,79	EFISIEN
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	91,01	45		0,00%	210.436.000	26.500.000	12,59%	0,00	-1,00	TIDAK EFISIEN
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,28			#DIV/0!	455.803.000	99.760.529	21,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84			#DIV/0!	548.317.000	48.815.541	8,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60			#DIV/0!	141.010.500	23.612.300	16,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>				<b>1.312</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>60.149.475.000</b>	<b>20.214.980.571</b>	<b>33,61%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>EFISIEN</b>

